



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 764, 2020

KEMEN-KUKM. Rencana Strategis. Tahun 2020–2024.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH TAHUN 2020–2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020–2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
 8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
 9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah pedoman bagi seluruh unit dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk periode 5 (lima) Tahun yakni 2020-2024.
2. Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM adalah organisasi non-eselon di bidang pembiayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
3. Lembaga Layanan Pemasaran-Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut LLP-KUKM adalah organisasi non-eselon di bidang pelayanan pemasaran yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi Kinerja KRISNA adalah aplikasi untuk menyusun Renja K/L dan Informasi Kinerja Anggaran yang bersifat *web based* yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja Kementerian atau Lembaga.

Pasal 2

Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS;
- c. BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN;
- d. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN;
dan
- e. BAB V PENUTUP.
- f. Lampiran

Pasal 3

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Renstra disusun sebagai acuan bagi:

- a. Renstra unit Eselon I di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Renstra LPDB-KUMKM dan Renstra LLP-KUKM;
- c. rencana kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Rencana Kerja setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. rencana program atau kegiatan pengembangan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di tingkat provinsi/kabupaten/kota dan lintas pemangku kepentingan;
- e. pelaksanaan program atau kegiatan pengembangan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan lintas pemangku kepentingan; dan
- f. pengendalian program atau kegiatan pengembangan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 5

- (1) Setiap pejabat Eselon I, Direktur Utama LPDB-KUMKM, Direktur Utama LLP-KUKM, dan Eselon II setingkat di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjabarkan lebih lanjut Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Renstra unit kerja masing-masing.
- (2) Setiap unit Eselon I, LPDB-KUMKM dan LLP-KUKM, harus menetapkan Indikator Kinerja Utama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra masing-masing unit Eselon I, LPDB-KUMKM dan LLP-KUKM, dan disampaikan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Indikator Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (4) Setiap pejabat Eselon I, Direktur Utama LPDB-KUMKM, dan Direktur Utama LLP-KUKM harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja berdasarkan Renstra dan Indikator Kinerja Utama yang telah disusun.
- (5) Renstra bersifat dinamis dan memiliki fleksibilitas yang dapat dilakukan penyempurnaan atau perubahan sesuai dengan perkembangan anggaran.

Pasal 6

Data dan informasi kinerja Renstra yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2020

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020-
2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sejalan dengan itu, maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah memberikan tahapan RPJPN 2005-2025 menjadi 4 (empat) tahapan RPJMN yaitu, RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014, RPJMN III Tahun 2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2024.

Saat ini RPJPN 2005-2025 memasuki tahapan ke IV yaitu RPJMN 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019. RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pemerintah memiliki 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yaitu: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kewirausahaan. Selain itu, implementasi pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, mencakup: (a) membangun budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif; (b) peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong; dan (c) penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri, seperti yang tercantum dalam lampiran I Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.

Disamping itu, dalam lampiran tersebut juga menyebutkan tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi untuk mewujudkan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Untuk itu, perspektif gender menjadi salah satu isu strategis dalam mengintegrasikan program dan kegiatan di Kementerian Koperasi dan UKM yang diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Penyebaran Virus Corona (Covid-19) sejak Tahun 2019 memberikan implikasi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Triwulan I Tahun 2020, pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami perlambatan, sehingga tumbuh hanya mencapai berkisar 2,97%. Terbatasnya kegiatan produksi dan aktivitas ekonomi, diakibatkan oleh terhambatnya pasokan barang baik antar daerah, antar pulau dan antar negara lain untuk keperluan produksi serta pembatasan aktivitas ekonomi guna pencegahan penyebaran virus corona (covid-19). Kondisi ini juga berpengaruh pada berkurangnya permintaan tenaga kerja, tertahannya pendapatan dan konsumsi masyarakat, sehingga mengurangi permintaan produk Koperasi dan UMKM. Melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi mengakibatkan terjadinya penyesuaian keadaan masyarakat berupa penundaan pengeluaran (konsumsi) terutama kunjungan ke tempat wisata dan umum (fasilitas layanan publik). Selain itu, kondisi yang belum membaik menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia, seiring dengan melemahnya permintaan global atas produk dalam negeri dan terbatasnya permintaan.

1.1.1 PENCAPAIAN PELAKSANAAN RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 2015-2019

Hasil-hasil pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015-2019 dimasukkan dalam perkembangan makro Koperasi dan UMKM nasional serta pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Koperasi dan UKM. Pencapaian ini memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan yang sudah ada dan penyusunan kebijakan baru dalam rangka memfasilitasi Koperasi dan UMKM untuk semakin berdaya saing.

A. Perkembangan Koperasi

Perkembangan koperasi nasional saat ini menunjukkan kinerja yang secara umum positif (Tabel 1.1.). Reformasi Total Koperasi telah berhasil meningkatkan kontribusi PDB Koperasi terhadap PDB Nasional dari 3,99% pada tahun 2016 meningkat menjadi 5,54% pada tahun 2019. Peningkatan kontribusi PDB Koperasi tersebut telah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta pemerataan pembangunan perekonomian nasional yang dapat dilihat melalui peningkatan jumlah volume usaha koperasi pada tahun 2016 sebesar Rp 67,50 triliun, naik 103% pada tahun 2017 menjadi Rp. 137,26 triliun, pada tahun 2018 naik 6,3% menjadi Rp. 145,86 triliun dan pada tahun 2019 naik 5,7% menjadi Rp. 154,14 triliun yang menggambarkan bahwa kontribusi koperasi dalam perekonomian juga mengalami peningkatan.

Dilihat dari perspektif skala nasional, maka peningkatan volume usaha tersebut dapat dijelaskan bahwa yang masuk dalam modal sendiri sebesar Rp. 26,25 triliun pada tahun 2016, Rp. 66,93 triliun pada tahun 2017, Rp. 74,90 triliun pada tahun 2018 dan Rp. 70,92 triliun pada tahun 2019, sedangkan modal luar secara nasional sebesar Rp. 28,23 triliun pada tahun 2016, Rp. 61,76 triliun pada tahun 2017, Rp. 66,22 triliun pada tahun 2018 dan Rp. 81,190 triliun pada tahun 2019. Asset yang dimiliki secara nasional pada tahun 2016 sebesar Rp. 54,48 triliun, pada tahun 2017 sebesar Rp. 128,70 triliun, pada tahun 2018 sebesar Rp. 141,13 triliun dan pada tahun 2019 Rp. 152,113 triliun

Jika dilihat dari sudut pandang anggota, maka jumlah anggota koperasi aktif mengalami peningkatan rata-rata 37,98% dari sejumlah 11.842.415 orang pada tahun 2016 menjadi 22.463.738 orang pada tahun 2019.

Tabel 1.1 Perkembangan Kinerja Koperasi 2016-2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	151.170	152.174	126.343	123.048
2	Jumlah Anggota (Orang)	11.842.415	18.228.682	20.049.995	22.463.738
3	Jumlah Sertifikasi NIK	7.185	20.136	30.188	35.761
4	Jumlah Modal Sendiri (Rp. Triliun)	26,25	66,93	74,90	70,92
5	Jumlah Modal Luar (Rp. Triliun)	28,23	61,76	66,22	81,190
6	Jumlah Asset (Rp. Triliun)	54,48	128,70	141,13	152,113

7	Jumlah Volume Usaha (Rp. Triliun)	67,50	137,26	145,86	154,718
8	Jumlah PDB Koperasi (%)	3,99	4,48	5,10	5,54

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

Kementerian Koperasi dan UKM juga telah membagi koperasi kedalam 17 (tujuh belas) sektor untuk memudahkan proses pendataan. Menurut data ODS, sektor usaha koperasi di bidang jasa keuangan dan asuransi mendominasi pilihan usaha koperasi yaitu sebanyak 56.017 koperasi, diikuti dengan sektor jasa lainnya sebanyak 36.911 koperasi. Selanjutnya, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor riil sebanyak 12.290, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebanyak 10.150 koperasi. Sektor informasi dan komunikasi sebanyak 1.962 koperasi serta sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 1.031 koperasi juga menjadi sektor pilihan bagi koperasi di Indonesia. Sektor lain yang hadir dalam usaha koperasi adalah sektor transportasi dan pergudangan sebanyak 701 koperasi, sektor industri pengolahan sebanyak 630 koperasi, sektor jasa perusahaan sebanyak 197 koperasi, sektor pertambangan dan penggalian sebanyak 183 koperasi, sektor pengadaan listrik dan gas sebanyak 89 koperasi, sektor konstruksi sebanyak 67 koperasi, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebanyak 37 koperasi, sektor jasa pendidikan sebanyak 28 koperasi, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak 27 koperasi, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebanyak 12 koperasi dan sektor real estat sebanyak 11 koperasi. Secara ringkas sektor koperasi tersebut ditunjukkan pada Gambar 1.1. berikut:

Gambar 1.1. Sektor Usaha Koperasi



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

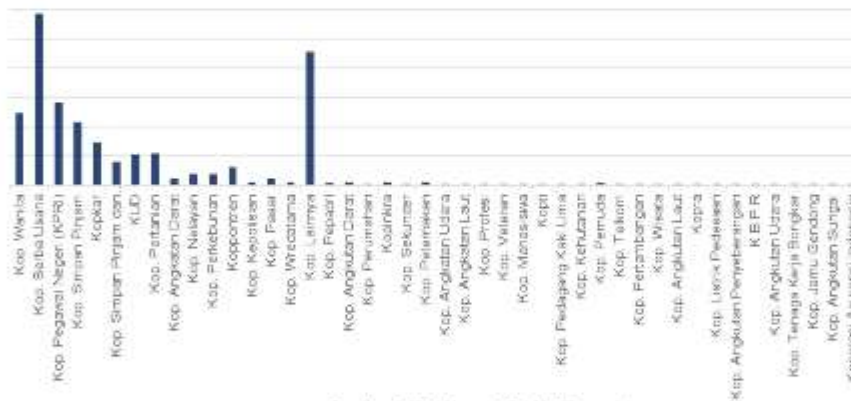
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa koperasi terbagi dalam 5 (lima) jenis yaitu: Koperasi Pemasaran, Koperasi Jasa, Koperasi

Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen dan Koperasi Produsen. Adapun jenis-jenis koperasi secara ringkas ditunjukkan pada Gambar 1.2. berikut:



Gambar 1.2. Jenis Usaha Koperasi
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

Sebagaimana hasil dari *Online Data System* (ODS) yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UKM, hasil pendataan diolah dan mengelompokkan koperasi kedalam 44 (empat puluh empat) kelompok yang secara ringkas ditunjukkan pada Gambar 1.3. berikut:



Gambar 1.3. Kelompok Usaha Koperasi
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

Lebih lanjut, pembagian koperasi kedalam beberapa kelompok tersebut diharapkan dapat mempermudah dan mempertegas pembinaan sehingga koperasi di Indonesia dapat berperan dalam pasar global sebagai peluang untuk meningkatkan kemakmuran bagi setiap negara yang berpartisipasi didalamnya. Dengan kata lain, globalisasi dapat menguntungkan semua pihak. Namun demikian, disisi lain ada pihak yang mendapat manfaat dari fenomena pasar global ini yaitu usaha berskala besar yang memiliki kapasitas besar dan mampu bersaing di pasar global. Koperasi harus bertindak sebagai perantara antara pasar global dan pasar lokal yang memungkinkan setiap anggotanya untuk menjalankan kontribusi mereka dan pada saat yang sama dapat menjadi pemilik koperasi.

B. Perkembangan UMKM

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM struktur usaha UMKM di bagi menjadi 4 (empat) kriteria, yaitu :

1. Usaha Besar, merupakan usaha yang memiliki asset lebih besar dari Rp. 10 miliar Rupiah dan omzet diatas Rp. 50 miliar (pada tahun 2018 berjumlah 5.550 Unit)
2. Usaha Menengah , merupakan usaha yang memiliki asset lebih besar dari Rp. 500 juta hingga Rp. 10 miliar dan omzet diatas Rp. 2,5 miliar hingga Rp. 5 miliar (pada tahun 2018 berjumlah 60.702 Unit)
3. Usaha Kecil , merupakan usaha yang memiliki asset lebih besar dari Rp. 50 juta hingga Rp. 500 juta dan omzet diatas Rp. 300 juta hingga Rp. 2,5 miliar (pada tahun 2018 berjumlah 783.132 Unit)
4. Usaha Mikro, merupakan usaha yang memiliki asset maksimum Rp. 50 juta dan omzet maksimum sebesar Rp. 300 juta (pada tahun 2018 berjumlah 63.5 juta Unit)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan UMKM ini berkontribusi dalam perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif serta kontribusinya dalam ekspor dan penciptaan modal tetap/investasi (Tabel 1.2).

Tabel 1.2 Perkembangan UMKM Indonesia 2015-2018

Indikator	2015	2016	2017	2018
Jumlah UMKM (unit)	59.260.000	61.650.000	62.922.617	64.194.057
Tenaga kerja (orang)	123.230.000	112.890.000	116.431.224	116.978.631
PDB Konstan (Rp. Triliun)	1.655,43	5.171,06	5.445,56	5.721,14
PDB harga Berlaku (Rp. Triliun)	6.228,29	7.009,28	7.820,28	8.573,89
Ekspor non migas (Rp. Triliun)	185,98	255,13	301,62	293,84
Investasi Harga Berlaku (Rp. Triliun)	1.818,75	2.057,97	2.377,41	2.564,54
Produktivitas UMKM per unit usaha (unit)	27.930.000	83.880.000	86.220.000	124.300.000
Produktivitas UMKM per Tenaga Kerja (unit)	13.430.000	45.830.000	46.500.000	68.320.000

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2018

UMKM memiliki peranan yang sangat strategis untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia dimana UMKM telah mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Kontribusi lainnya dari UMKM dalam penopang perekonomian Indonesia adalah 61,07% dari pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), 14,37% dari sisi ekspor non migas dan 60,42% penciptaan modal tetap/investasi.



Gambar 1.4. Kontribusi UMKM dalam Angka
 Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2018

Kontribusi penyerapan tenaga kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan data yang diolah Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 116,97 juta orang atau sebesar 97% dari total tenaga kerja sebanyak 120,598 juta orang. Kontribusi PDB UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 61,07% dan Rasio Kewirausahaan tahun 2018 sebesar 3,47%. Jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan dari sebesar 59,26 juta unit pada tahun 2015 menjadi sebesar 64,1 juta pada tahun 2018 dan diperkirakan akan bertumbuh hingga 68,60 juta pada tahun 2020. Produktivitas sektor UMKM per unit usaha mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 27,93 juta pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 86,22 juta pada tahun 2017 dan diperkirakan akan bertumbuh hingga 182,59 juta pada tahun 2020. Produktivitas per tenaga kerja meningkat dari Rp. 13,43 juta pada tahun 2015 menjadi Rp. 46,50 juta pada tahun 2017 dan diperkirakan akan bertumbuh hingga 101,39 juta pada tahun 2020. Rendahnya produktivitas menjadi kendala bagi UMKM untuk berkembang dan mencapai skala ekonomi yang semakin besar. Kondisi ini menyebabkan fenomena *missing middle* seperti yang ditulis dalam dokumen World Bank dan dijelaskan lebih rinci oleh Chang-Tai Hsieh dan Benjamin A. Olken melalui jurnal ekonomi *The Missing “Missing Middle”* (2014) mengenai usaha kecil dan menengah yang sebenarnya dibutuhkan untuk menopang industrialisasi dan ekspor.

C. Pencapaian Target Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM 2015-2019

Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2016-2017 menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dan pada tahun 2018 menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis terkait dan substansi pembangunan Koperasi dan UMKM. Secara umum, pencapaian target pembangunan Koperasi dan UMKM pada tahun 2016, 2017 dan 2018 cukup bervariasi secara persentase. Untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2016-2017 sebagaimana Tabel 1.3. berikut:

Tabel 1.3 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016-2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2016	2017	2016	2017
1	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang Berasal dari Pelaku Koperasi dan UMKM	Proporsi Jumlah Tenaga Kerja Koperasi	7,5%	7,5%	3,87%	5,33%
2	Meningkatnya	Proporsi Jumlah Koperasi	11%	11%	658,55%	650,57%

	Jumlah, Skala dan Kapasitas Usaha Koperasi dan UMKM	Aktif				
3	Meningkatnya Pendapatan dan <i>Income</i> Masyarakat dari Pelaku UMKM	Proporsi UMKM yang Mengakses Pembiayaan Formal dengan Target Sebesar 25%	5%	5%	8%	138,8%
4	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional, Kredible dan Akuntabel	1. Persentase Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/Provinsi, Primer Kab/Kota) yang aktif dan RAT	33%	33%	16,82%	85,24%
		2. Persentase Pertumbuhan Rata-Rata Volume Usaha Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/Provinsi, Primer Kab/Kota)	18%	18%	-203,28%	153,72%
		3. Persentase Pertumbuhan Rata-Rata Jumlah Anggota Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/Provinsi, Primer Kab/Kota)	10%	10%	-309%	14,9%
		4. Persentase Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/Provinsi, Primer Kab/Kota) yang Memiliki Kategori Sehat/Berkualitas Terhadap Tingkat Persepsi Masyarakat Terhadap Koperasi	10%	10%	100%	130%
5	Terwujudnya Wirausaha dari Pelaku UMKM yang Tangguh dan Mandiri	1. Persentase/Proporsi Pertambahan Jumlah Wirausaha	10.000 Orang	10.000 Orang	108%	200,05%
		2. Persentase UMKM yang Berpotensi Tumbuh dan Inovatif	0,35%	0,35%	62,86%	322,86%
6	Meningkatnya UMKM dalam Berkontribusi pada Perekonomian Daerah dan Nasional	1. Persentase Kontribusi UMKM dalam PDRB dan PDB Nasional	7,5%	7,5%	14,27%	40,13%
		2. Persentase Rata-Rata Kontribusi UMKM Ekspor Non-migas	7%	7%	0,71%	41,71%
		3. Persentase Rata-Rata Pertambahan Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Investasi	10,5%	10,5%	-20,38%	28,38%
		4. Jumlah UMKM dan	2.000	2.000	67,6%	104,15%

		Koperasi yang Menerapkan Standardisasi Mutu dan Sertifikasi Produk dengan Target Sebanyak 10.000 Unit	UMKM	UMKM		
7	Meningkatnya Koperasi dan UMKM dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Kontribusi Pendapatan Anggota (SHU) Koperasi dan Pelaku UMKM dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	0,5%	0,5%	128%	129,24%
8	Kapasitas Organisasi Kementerian Koperasi dan UKM	1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM	B	B	100%	100%
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM	B	B	100%	100%
		3. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kementerian Koperasi dan UKM	3,00	3,00	81,6%	73,66%
		4. Opini BPK dan Publik tentang Laporan atas Kinerja Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM	WTP	WTP	100%	100%

Pada tahun 2018, terdapat perubahan Target Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, dikarenakan adanya revisi pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015-2019 berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015-2019. Adapun pencapaian target kinerja tahun 2018 sebagaimana Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Capaian 2018
1	Terciptanya Koperasi dan UMKM dalam Perluasan Kesempatan Kerja serta Pemerataan Pendapatan	1. Persentase Jumlah Tenaga Kerja UMKM	4%-5,5%	6,5%
		2. Persentase Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/Provinsi, Primer Kab/Kota) yang Memiliki Kategori Sehat/Berkualitas	10%	200%
		3. Persentase Jumlah Wirausaha Nasional	10.000 Orang	79,68%
2	Terwujudnya Koperasi dan	1. Persentase Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam Pembentukan PDB	6,5%-7,5%	173,54%

	UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi serta Pengentasan Kemiskinan	2. Persentase Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam ekspor non-migas	5%-7%	-29,2%
		3. Persentase Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Investasi	8,5%-10,5%	172,47%
		4. Pertumbuhan Produktivitas UMKM	5%-7%	88%
		5. Proporsi UMKM yang Mengakses Pembiayaan Formal	25% (5% pertahun)	143,4%
		6. Jumlah UMKM dan Koperasi yang Menerapkan Standardisasi Mutu dan Sertifikasi Produk	2.000 Unit	127,3%
		7. Partisipasi Anggota Koperasi dalam Permodalan	55%	96,51%
		8. Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi	7,5%-10%	-327,07%
		9. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	15,5%-18%	319,55%
		3	Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	1. Indeks Reformasi Birokrasi
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM	Baik	100%

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

1.1 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 POTENSI

A. Potensi Koperasi

Menurut data *International Co-operative Alliance* (ICA) tahun 2019, koperasi atau kelompok koperasi di seluruh dunia menghasilkan omset sebesar USD 2,1 triliun sekaligus menyediakan layanan dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat untuk berkembang. Setidaknya 12% orang di seluruh dunia adalah bagian dari 3 juta koperasi di seluruh dunia dan data ICA menyebutkan bahwa Koperasi memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan yang stabil dan berkualitas dengan mempekerjakan 280 juta orang di seluruh dunia atau sekitar 10% dari populasi pekerja dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir muncul istilah "*sharing economy*" atau "*collaborative economy*". Istilah-istilah ini biasanya digunakan untuk merujuk pada penggunaan platform digital dalam mengolaborasikan beragam kelompok dari berbagai sektor dengan bermacam-macam sumber daya untuk saling bertukar, berbagi, atau bersinergi dalam berbagai cara. Platform ekonomi kolaboratif baru terus diluncurkan oleh perusahaan, organisasi nirlaba, kelompok informal, dan beroperasi secara lokal, nasional, atau bahkan global. Gagasan yang mendasari *collaborative economy* adalah bahwa banyak sumber daya yang ada masih kurang dimanfaatkan oleh pemiliknya, padahal sumber daya itu bisa memiliki nilai lebih tinggi jika dibagikan atau

dipertukarkan dengan pihak lain yang mungkin lebih membutuhkannya. Salah satu manfaat sosial terpenting dari *sharing/collaborative economy* adalah penciptaan wirausaha baru.

Melihat potensi platform *sharing economy* sebagai alat strategis untuk mendistribusi kemakmuran, seharusnya model bisnis ini bisa menjadi model miniatur dari ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan semangat koperasi. Studi yang dilakukan oleh Parlemen Uni Eropa pada tahun 2016 memperkirakan nilai omset seluruh pelaku *collaborative economy* dapat mencapai \$ 572 miliar pada tahun 2025.

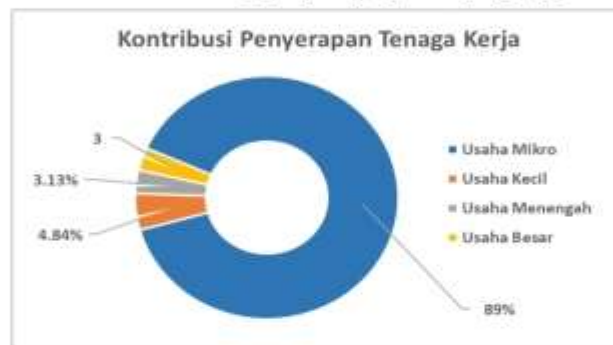
Di Indonesia, perkembangan Teknologi Informasi (TI) juga telah menghadirkan berbagai inovasi dalam berusaha. Bonus demografi serta infrastruktur teknologi informasi yang masif telah melahirkan *start-up* dengan aneka layanan berbasis *smartphone*. *Start-up* adalah model bisnis baru yang saat ini sangat diminati oleh para millenials. Indonesia saat ini memiliki hampir 1000 *start-up* dan berdasarkan hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa pengguna internet mencapai 171,17 juta orang. Kondisi ini dapat menjadi peluang bagi gerakan koperasi di Indonesia untuk berinovasi dengan asumsi bahwa nilai-nilai koperasi seperti pengelolaan yang demokratis, kesetaraan dan keadilan sangat selaras dengan gaya hidup millenials. Oleh karenanya, pengembangan koperasi model *start-up* atau sebaliknya *start-up* berbasis koperasi dapat dijadikan upaya dalam menghadapi revolusi industri 4.0 serta bonus demografi. Nilai-nilai koperasi seperti demokrasi, kesetaraan, keadilan dan lainnya dapat selaras dalam menjawab keadaan perseroan dimana pemilik modal berkuasa penuh. Komunitas kreatif yang tumbuh di era ekonomi kreatif akan merasa tepat berada dalam model koperasi daripada perseroan karena koperasi lebih mengafirmasi dan mengamplifikasi nilai sosial-budaya suatu komunitas. Hal ini akan menjadi energi baru yang dibutuhkan untuk melakukan regenerasi di masa bonus demografi, sehingga memberikan optimisme terhadap model ini untuk dapat berkembang terus dan tidak hanya bersifat sementara.

B. Potensi UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia, aktivitas UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya. Oleh sebab itu, jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai 99 persen dari total jumlah sektor usaha yang ada menjadikan UMKM sebagai salah satu wadah paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian tinggi. Menurut data yang diolah Kementerian Koperasi dan UKM bersama BPS, UMKM telah menyerap 97 persen tenaga di Indonesia atau sebanyak 116,97 juta orang.

Salah satu faktor yang mendukung peran UMKM terhadap perekonomian nasional adalah bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia. Berdasarkan data BPS, rasio kelompok usia produktif di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dari 67,4 persen pada tahun 2010

(Jumlah penduduk 237,6 juta) menjadi 69,7 persen pada tahun 2025. Indonesia saat ini tengah memasuki fase bonus demografi. Menurut hasil Susenas Tahun 2018, Indonesia adalah rumah bagi 63,82 juta jiwa pemuda. Jumlah proporsi tersebut merupakan seperempat dari total penduduk atau berjumlah 24,15 persen dari total sekitar 265 juta jiwa penduduk Indonesia yang jika dikombinasikan dengan 64,19 juta unit Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Selain itu, peningkatan demografi ini tentunya akan diikuti oleh meningkatnya perkembangan sektor-sektor ekonomi seperti: teknologi, hiburan, pendidikan, konsumsi, perdagangan dan keuangan yang akan bertumbuh pesat. Meningkatnya perkembangan sektor-sektor ekonomi tersebut diharapkan mampu mengurangi permasalahan tingkat pengangguran dan mampu menguatkan daya serap tenaga kerja di beberapa sektor industri. Kontribusi penyerapan tenaga kerja oleh UMKM sebesar 97 persen memberikan kontribusi terhadap pengurangan jumlah pengangguran.



Gambar 1.5. Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

Pengembangan pembangunan ekonomi yang berbasis partisipasi masyarakat luas sebagai pelaku usaha merupakan komitmen pemerintah dalam pembangunan ekonomi saat ini. UMKM sebagai pondasi perekonomian nasional dapat dilihat dari data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018 bahwa kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 61,07 persen dan terhadap Ekspor Non Migas sebanyak 14,37 persen.

1.2.2 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

A. Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Koperasi

Pelaksanaan Reformasi Total Koperasi melalui Reorientasi, Rehabilitasi dan Pengembangan telah memberikan dampak bagi eksistensi Koperasi di Indonesia. Menurut data ODS yang telah dipilah dan diverifikasi, sebanyak 40.013 unit koperasi telah dibubarkan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi koperasi yang tidak aktif atau tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan atau tidak menjalankan kegiatan usaha.

Awal permasalahan pembubaran koperasi tersebut, diantaranya bisa disebabkan oleh permasalahan kapasitas aparatur pembina dan kualitas pelaku koperasi, antara lain: 1) Adanya motivasi salah dalam mendirikan koperasi yang hanya mengharapkan bantuan semata; 2) Masih adanya salah paham dalam kepengurusan koperasi, yaitu menggunakan badan hukum koperasi untuk kepentingan pribadi; 3) Masih adanya pola yang salah dalam mengurus koperasi mengakibatkan usaha koperasi tidak berkembang bahkan cenderung mengalami defisit; dan 4) Masih kurang optimalnya pembinaan akibat keterbatasan kompetensi dan komitmen dari para pembina koperasi, baik Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di daerah, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) maupun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM.

Dalam era digitalisasi ini terdapat beberapa tantangan dan permasalahan lain, selain permasalahan diatas yang harus dihadapi oleh koperasi. Permasalahan besar koperasi adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen usaha yang professional.
- b. Para kaum muda atau yang lebih sering disebut millennial di Indonesia hanya sedikit sekali yang tertarik dengan koperasi karena melihatnya sebagai model yang ketinggalan zaman atau kurang modern, dijalankan oleh orang-orang tua dan dianggap kurang inovasi. Hal ini berdampak pada tata kelola koperasi yang kurang mengikuti perkembangan atau belum sepenuhnya menggunakan teknologi dan model bisnis yang lebih selaras dengan perkembangan. Oleh karenanya, Koperasi harus mampu menarik minat kaum muda sebagai target yang potensial agar masuk kedalam ekosistem koperasi dan memberikan sentuhan inovasi serta kreativitas yang dapat menjadi modal bagi Koperasi untuk memiliki daya saing maupun insiatif model bisnis baru. Selain itu, dapat mempercepat proses regenerasi SDM koperasi (*millennials take over*).

2. Kelembagaan

Visi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2020-2024 berorientasi pada penciptaan lapangan kerja baru. Secara statistik serapan tenaga kerja di sektor koperasi masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia belum memiliki model kelembagaan koperasi. Sebagian besar koperasi saat ini yang paling dominan, yaitu: simpan pinjam (*credit union*), konsumsi dan produksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain dilihat dari sisi kebutuhan konsumen dari bisnis yang dijalankan oleh Koperasi dimana jenis Koperasi Simpan Pinjam yang menyediakan jasa modal maupun dana bagi anggotanya dipandang lebih diminati. Hal yang sama berlaku bagi Koperasi Konsumen dan Koperasi Produksi yang lebih mudah dijalankan dan memiliki pangsa pasar yang dapat dijangkau serta tidak membutuhkan modal yang besar jika dibandingkan dengan jenis Koperasi yang lain. Dari sisi kelembagaan Koperasi khususnya pembentukan Koperasi dan pembuatan akta, anggota maupun pengurus Koperasi tidak menemui banyak kesulitan karena mudahnya prosedur namun akan kesulitan saat harus mengurus izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang lebih besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait, sehingga menurunkan motivasi dan kreativitas untuk mengembangkan kelembagaannya. Koperasi juga masih dipandang sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum memandang koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

3. Pembiayaan

Perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan yang lebih inklusif serta berbasis investasi.

4. Produksi dan Pemasaran

Pada umumnya, sistem produksi dan pemasaran Koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengkonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

B. Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan UMKM

UMKM di Indonesia memiliki beberapa permasalahan, seperti: bidang manajemen, organisasi, teknologi, permodalan, operasional dan teknis di lapangan, terbatasnya akses pasar, kendala perizinan, serta biaya-biaya non-teknis di lapangan yang sulit untuk dihindarkan. UMKM yang mengalami kesulitan usaha 72.47%, sisanya 27.53% tidak ada masalah. Dari jumlah rasio 72.47% yang mengalami kesulitan usaha tersebut, diidentifikasi beberapa permasalahan dan kesulitan yang dihadapi adalah: (1) permodalan, sebesar 51.09%; (2) pemasaran, 34.72%;

(3) bahan baku, 8.59%; (4) ketenagakerjaan, 1.09%; (5) distribusi transportasi, 0.22%; dan (6) lainnya sebesar 3.93%.



Gambar 1.6. Persentase UMK menurut berbagai karakteristik pengusaha/pekerja, berdasarkan hasil SE 2016
Sumber: Sensus Ekonomi BPS, 2016

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan sistem manajemen pembagian tugas yang baik. Namun secara umum, kualitas pendidikan pengelola UMK masih rendah menjadikannya tantangan bagi Pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha, misalnya dengan memberikan pelatihan.

UMK di Indonesia memiliki karakteristik informal yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Mayoritas UMK belum menggunakan komputer dan belum memanfaatkan internet serta belum menjalin kemitraan dengan perusahaan besar atau dengan kata lain tidak kunjung naik kelas sehingga menjadi salah satu tantangan terbesar ekonomi Indonesia saat ini. Kontribusi UMKM terhadap PDB yang mencapai 61,07% lebih dianggap tidak sebanding dengan jumlahnya yang lebih dari 90% pelaku usaha. Selain itu total nilai ekspor UMKM juga masih rendah yaitu hanya mencapai 14,37%. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

- a. Menurut data BPS tahun 2019, Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan hanya 22,48%.
- b. Minimnya pengetahuan pengusaha UMK tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi bisnisnya.
- c. Secara umum, UMK di Indonesia tidak memiliki mentor bisnis menyebabkan UMK kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya.

2. Produksi dan Pemasaran

- a. Jumlah produk UMKM yang mampu menembus pasar internasional masih sangat sedikit sekali disebabkan oleh kurangnya kreativitas pelaku UMKM dan inovasi produk yang masih rendah.
- b. Selain itu, UMKM di Indonesia mengalami kesulitan dalam mendistribusikan produk (barang dan jasa).
- c. UMKM di Indonesia masih banyak yang belum memaksimalkan pemasaran secara *online*.
- d. Pelaku UMKM di Indonesia masih banyak yang belum sadar akan pentingnya *branding* bagi produk dan usahanya.

3. Pembiayaan

Minimnya modal usaha adalah permasalahan yang paling mendasar menyebabkan UMKM tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omzet yang lebih banyak. Di sisi lain, Koperasi Simpan Pinjam menyediakan jasa pinjaman modal yang dapat digunakan sebagai modal usaha bagi UMKM namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

4. Kelembagaan

Di Indonesia, jumlah UMK yang tidak berbadan usaha masih sangat mendominasi yaitu mencapai lebih dari 90% atau sekitar 98,68%.

C. Permasalahan dan Tantangan Kementerian Koperasi dan UKM

Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai institusi yang melaksanakan kebijakan pengembangan Koperasi dan UKM juga memiliki beberapa permasalahan dan kendala pada struktur organisasi saat ini, yaitu:

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Koperasi dan UKM kurang mengakomodir amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak selaras dengan amanat RPJMN IV Tahun 2020-2024 dan perencanaan strategis, sehingga sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan Pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan akan sulit tercapai.
2. Nama Nomenklatur Deputi dan Keasdepan pada Kementerian Koperasi dan UKM saat ini, belum mencerminkan fungsi kebijakan dan tujuan organisasi. Sehingga Indikator Kinerja disetiap kedeputan kurang memenuhi kaidah Indikator Kinerja yang SMART. Selain itu, berdampak juga pada aktivitas kegiatan pada masing-masing kedeputan banyak yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan.
3. Pada tingkat struktur eselon II atau keasdepan, tidak saling terkait proses bisnis yang jelas serta jenjang struktur di setiap keasdepan sampai dengan eselon IV juga masih belum memiliki keterkaitan hubungan kerja yang jelas dan terukur, sehingga penyusunan peta proses bisnis menjadi sulit dilakukan.

4. Belum adanya unit yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan Koperasi dan UKM serta pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) non fisik PK2UKM di daerah.
5. Unit pelaksana teknis yang dapat memberikan pelayanan diklat teknis substansi koperasi dan UMKM kepada Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM juga belum ada.
6. Fungsi perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan UMKM masih belum berjalan dengan optimal.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

2.1 VISI

Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa tidak ada lagi visi dan misi Menteri, hanya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, Presiden berharap agar semua menteri benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya Kementerian Koperasi dan UKM mengarahkan visi dan misinya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Tabel 2.1 Visi, Misi dan tema Pengembangan KUMKM 2020-2024



Sumber: Dokumen RPJMN 2020-2024

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan KUMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya yaitu, “Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”. Maju

*) Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2019 dan Surat Menteri PPN Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019

bermakna Koperasi Generasi Baru Yang Maju dan Modern, Berdaulat dan Mandiri bermakna UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global

2.2 MISI

Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UMKM 2020-2024, maka Misi Kementerian Koperasi dan UMKM 2020-2024 merupakan penjabaran dari Pokok Visi tersebut di atas, yaitu:

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru Yang Maju dan Modern.
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

2.3 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
 - a. Modernisasi Koperasi;
 - b. Melahirkan Wirausaha Baru (*New Enterpreuner*).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. Integrasi UMKM dalam *Global Value Chains* (GVC);
 - b. UMKM Naik Kelas (*Scaling Up*).
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM

Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Modernisasi Koperasi	1. 500-1000 Koperasi Model Baru 2. 5%-10% Koperasi Berinovasi dan Memanfaatkan Teknologi
		Melahirkan Wirausaha Baru (<i>New Enterpreuner</i>).	1. 3,55%-3,95% Rasio Kewirausahaan Nasional 2. 700-3500 <i>Start up</i> Berbasis Koperasi
2	Terwujudnya	Integrasi UMKM dalam <i>Global</i>	7 Komoditas Ekspor

	UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Value Chains (GVC)	UKM
		UMKM Naik Kelas (<i>Scaling Up</i>)	0,5% Usaha Mikro Naik Kelas
3	Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM	A
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM	A

2.5 NILAI ORGANISASI*

Organisasi yang baik memerlukan penerapan nilai-nilai yang baik pula, terutama agar dapat menjabarkan misinya sehingga tercapai visi yang diharapkan. Nilai-nilai yang disepakati untuk diterapkan dalam Kementerian Koperasi dan UKM antara lain:

1. Integritas

Integritas berarti mengutamakan perilaku terpuji, disiplin dan penuh pengabdian. Integritas juga diartikan sebagai mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

2. Kerja Keras

Kerja keras berarti mengerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah dan tidak akan berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang telah dilakukan.

3. Profesional

Profesional berarti menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas dan mengutamakan kompetensi (keahlian) dalam bidang pembangunan Koperasi dan UMKM.

4. Akuntabel

Akuntabel adalah dapat mempertanggungjawabkan tugas dengan baik dari segi proses maupun hasil.

5. Inovatif

Inovatif berarti usaha dengan mendayagunakan pemikiran dan kemampuan dalam menghasilkan sesuatu kreasi/karya baru yang diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan Koperasi dan UMKM.

6. Peduli

Peduli berarti memiliki perhatian terhadap kondisi dan permasalahan negara dan bangsa, terutama dalam hal birokrasi dan aparatur.

7. Pelayanan Prima

Pelayanan prima berarti upaya dan langkah yang dilakukan instansi untuk melayani masyarakat dan *stakeholders* dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat dan *stakeholder* atas pelayanan kepada publik.

*) Nilai Organisasi mengacu pada Renstra 2015-2019

2.5 SASARAN STRATEGIS

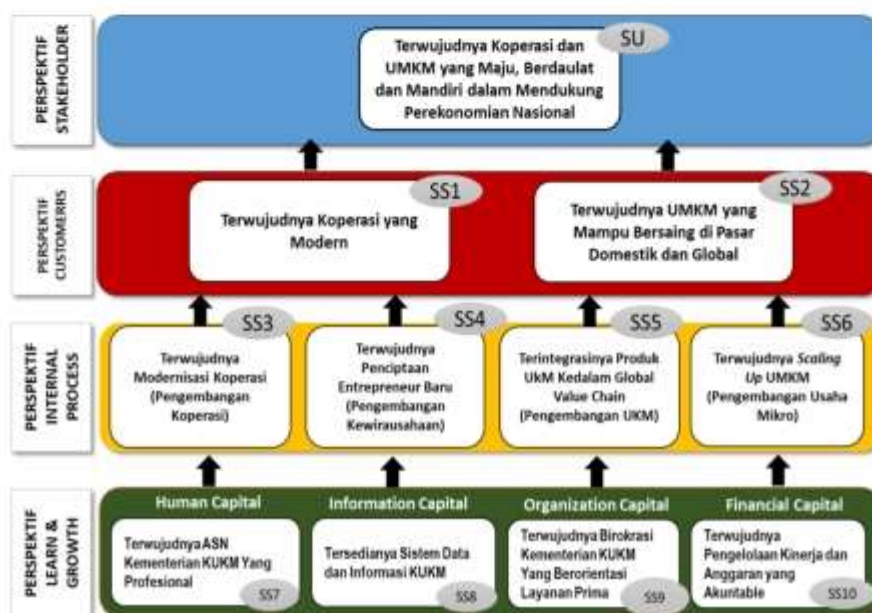
Sasaran strategis Pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan kondisi yang ingin dicapai sebagai suatu *outcome* dan *impact* dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Mewujudkan Koperasi yang Berdaulat, Mandiri, Maju dan Modern	Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi
			Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern
			Pertumbuhan <i>Start-up</i> berbasis Koperasi
2	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Mewujudkan UMKM yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Persentase Kontribusi PDB sektor UMKM
			Persentase Total Nilai Ekspor UMKM
			Persentase Total Investasi UMKM
			Persentase UKM Naik Kelas
			Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM
Rasio Kewirausahaan			
3	Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif	Indeks Kualitas Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Program/Kegiatan Pengembangan Koperasi dan

	melalui Program/Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan	UMKM
	Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM
	Mewujudkan profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM
	Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi	Kualitas Integrasi Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Maturitas SPIP dan Kapabilitas APiP
	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Opini BPK

Secara perspektif, maka Sasaran Utama dan Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

a. Perspektif Stakeholder

Sasaran Utama (SU) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri dalam Mendukung Perekonomian Nasional”

b. Perspektif Customers

Sasaran strategis pertama (SS1) adalah “Terwujudnya Koperasi yang Modern”. Selanjutnya, sasaran strategis kedua (SS2) adalah “Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global” dengan indikator kinerja:

c. Perspektif Internal Process

Sasaran strategis (SS3-SS5) adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Yaitu:

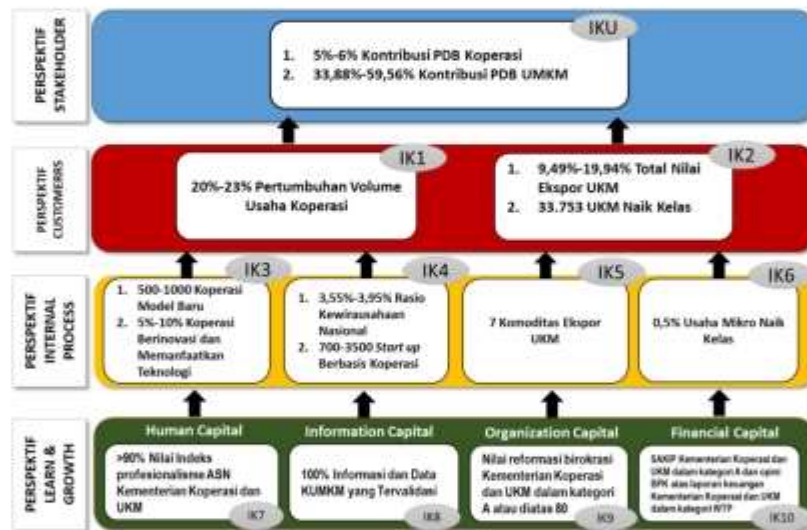
- a. SS3 “Tersedianya Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM Yang Efektif”
- b. SS4 adalah “Terselenggaranya Program/Kegiatan Pengembangan KUMKM yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan”
- c. SS5 “Terselenggaranya Pengendalian Pengawasan Kebijakan/Program/Kegiatan KUKM secara Berjenjang”

d. Perspektif *Learn & Growth* (Input)

Dalam *perspective* ini terdapat 4 sasaran strategis (SS6-SS9) yang akan dicapai:

- SS6 “Terwujudnya profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM”
- SS7 “Terwujudnya Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM Yang Terintegrasi”
- SS8 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik”
- SS9 adalah “Terkelolanya Anggaran Pengembangan Koperasi dan UMKM secara Akuntabel”

Selanjutnya, untuk Indikator Kinerja Utama Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Indikator Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

1. Perspektif *Stakeholder*

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai adalah

- 5%-6% Kontribusi PDB Koperasi
- 33,88%-59,56% Kontribusi PDB UMKM

2. Perspektif *Customers*

Pada perspektif pertama ini, Indikator Kinerja pertama (IK1) adalah 20%-23% Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi, Selanjutnya, Indikator Kinerja kedua (IK2) adalah:

- 9,49%-19,94% Total Nilai Ekspor UKM
- 33.753 UKM Naik Kelas

3. Perspektif *Internal Process*

Indikator Kinerja 3 sampai 6 (IK3-IK6) yaitu:

- a. IK3 “500-1.000 Koperasi Model Baru dan 5%-10% Koperasi Berinovasi dan Memanfaatkan Teknologi”
- b. IK4 “3,55%-3,95% Rasio Kewirausahaan Nasional dan 700-3.500 *Start up* Berbasis Koperasi”
- c. IK5 “7 Komoditas Ekspor UKM”
- d. IK6 “0,5% Usaha Mikro Naik Kelas

4. Perspektif *Learn & Growth*

Dalam perspective ini terdapat 4 Indikator Kinerja (IK7-IK19) yang akan dicapai:

- a. IK7 “Terwujudnya profesionalisme ASN Kementerian KUKM” dengan indikator kinerja. Indeks profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM dengan nilai >90% pada tahun 2024;
- b. IK8 “Terwujudnya 100% Informasi dan Data KUMKM yang tervalidasi;
- c. IK9 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kementerian KUKM yang Baik” dengan indikator kinerja Nilai reformasi birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM dalam kategori A atau diatas 80, tingkat maturisasi SPIP pada level 4;
- d. IK10 adalah “Terkelolanya Anggaran Pengembangan KUKM secara Akuntabel” dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Kementerian Koperasi dan UKM dalam kategori A dan opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM dalam kategori WTP

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang menjadi sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Pemerintah memiliki 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yaitu: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, kebijakan nasional di bidang Koperasi dan UMKM tahun 2020-2024 diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian pada tahun 2020-2024 yang mencakup, Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi yang dilaksanakan dengan strategi :

1. Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Besar, mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha;
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan impact investment, serta pendampingan mengakses kredit/ pembiayaan;
3. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi;
4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up* dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan
5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengembangan kewirausahaan dan UMKM, termasuk koperasi dan sentra IKM, diarahkan: sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan KEK, Kawasan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T) dan Terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur. Selain itu, RPJMN 2020-2024 juga mengarahkan koperasi untuk mendukung pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, melalui revitalisasi spirit koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong.

Secara ideal, agenda pembangunan merupakan amanat pembangunan bagi Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal ini, dari ketujuh agenda pembangunan tersebut, terdapat 2 (dua) agenda pembangunan yang menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi selama periode 2020-2024, yaitu:

Agenda ke-1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pembangunan ekonomi dalam 5 (lima) tahun ke depan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
2. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Pada agenda pembangunan ini, salah satu sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun akan datang dan menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM adalah meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing perekonomian. Arah kebijakan yang disusun untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah melalui penguatan kewirausahaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi.

Pada RPJMN 2020-2024, Rasio Kewirausahaan Nasional ditargetkan tumbuh 3,3%-3,95%; Pertumbuhan Wirausaha Baru 1,7%-4%; Kontribusi Koperasi Terhadap PDB 5,10%-5,50%;

Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 24,7%-30,78%; Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Perbankan 19,75%-22%; Proporsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 50,4%-80%; Proporsi Nilai Penyaluran Pinjaman Perbankan kepada IKM 2,4%-5%; Jumlah Koperasi Modern yang dikembangkan 0-500; Jumlah Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Baru Diluar Jawa yang Beroperasi 22 sentra sampai 30 sentra (kumulatif); Proporsi Nilai Tambah IKM Terhadap Total Nilai Tambah Industry Pengolahan Non Migas 18,5%-20%; Kontribusi usaha sosial 1,9%-2,5% dan Penumbuhan *start-up* 700 unit - 3.500 unit (kumulatif).

Tabel 3.1 RPJMN Bappenas 2020-2024

RPJMN BAPENAS 2020-2024				
Sasaran	No	Indikator	2020	2024
Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi	1	Rasio Kewirausahaan Nasional	3,3%	3,95%
	2	Pertumbuhan Wirausaha Baru	1,7%	4%
	3	Kontribusi Koperasi Terhadap PDB	5,10%	5,50%
	4	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	24,7%	30,78%
	5	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	19,75%	22%
	6	proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Produksi	50,4%	80%
	7	Proporsi Nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM	2,40%	5%
	8	Jumlah Koperasi modern yang dikembangkan	0	500
	9	Jumlah sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) baru di luar Jawa yang beroperasi	22 sentra	30 sentra (kumulatif)
	10	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan non migas	18,50%	20%
	11	Kontribusi usaha sosial	1,9% PDB	2,5% PDB
	12	Penumbuhan <i>start-up</i>	748 unit (kumulatif)	3.500 unit (kumulatif)

Sumber: Dokumen RPJMN 2020-2024

Dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024, indikator yang dipergunakan disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM

RENSTRA KEMENKOP UKM 2020-2024		
Indikator	2020	2024
Kontribusi PDB Sektor UMKM	33,88%	59,56%
a. Rasio Kewirausahaan	3,55%	3,95%
b. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM	700 Start Up	3.500 Start Up
c. Pertumbuhan <i>start-up</i> berbasis koperasi	5%	10%
Kontribusi PDB Sektor Koperasi	5%	6%
a. Persentase Total Nilai Ekspor UMKM	9,49%	19,94%
b. Persentase Total Investasi UMKM	58%	63%
c. Persentase UKM Naik Kelas	0,05%	4%
Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern	25 Unit Koperasi	423 Unit Koperasi

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2020

Berdasarkan Indikator Kinerja Kementerian koperasi dan UKM pada Tabel 3.2 diatas bahwasanya Kontribusi PDB sektor UMKM diharapkan dapat tumbuh pada kisaran 33,88%-59,56%; pertumbuhan *start-up* berbasis koperasi antara 700-3.500 *start-up*; pertumbuhan jumlah

tenaga kerja UMKM sebesar 5%-10%; kontribusi PDB sektor koperasi berkisar 5%-6%; persentase total nilai ekspor UMKM berada pada angka 9,49%-19,94%; persentase total investasi UMKM dikisaran 58%-63%; persentase jumlah UKM naik kelas yaitu 0,05%- 4%; dan jumlah koperasi model baru dan modern 423 Koperasi.

Agenda ke-2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

1. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
2. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
3. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
4. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
5. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Upaya untuk mengurangi daerah tertinggal masih terkendala oleh terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan pendukung ekonomi di daerah tertinggal, akibatnya kapasitas sumber daya manusia dan pendapatan masyarakat di daerah tertinggal.

Sebagai salah satu upaya pencapaian tujuan nasional, yaitu untuk mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, menjadi prasyarat dibutuhkan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Strategi yang digunakan dalam kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan adalah strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan.

Tabel 3.3 Kesenjangan Wilayah Berdasarkan Pulau di Indonesia

No	Wilayah Pembangunan	Kemiskinan		Tingkat Pengangguran (%)	Kesenjangan Antar Wilayah*	Kesenjangan Desa-Kota*
		Jumlah (ribu jiwa)	%			
1	Sumatera	5.900,1	10,4	5,2	0,40	0,17
2	Jawa Bali	14.112,9	9,2	5,8	0,73	0,33
3	Nusa Tenggara	1.882,9	18,3	3,3	0,23	0,32
4	Kalimantan	988,5	6,2	5,0	0,72	0,08
5	Sulawesi	2.107,6	10,9	4,9	0,15	0,29
6	Maluku	288,7	13,4	7,8	0,08	0,19
7	Papua	1.123,3	26,7	4,2	0,18	0,07

* Indeks Williamson

Sumber: Dokumen RPJMN 2020-2024

Strategi pertumbuhan adalah strategi berbasis ekonomi yang dilaksanakan pada daerah-daerah yang memiliki daya kompetitif yang tinggi dengan mendorong operasionalisasi dan meningkatkan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan. Sementara itu strategi pemerataan adalah strategi yang mendorong pertumbuhan pusat-pusat aktivitas melalui:

1. pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian dengan memperhatikan karakteristik aktivitas ekonomi di masing-masing wilayah termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan transmigrasi, dan
2. pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan transmigrasi.

Tabel 3.4 Tingkat Pertumbuhan Berdasarkan Pulau di Indonesia

Wilayah	Target Pertumbuhan	Target tingkat kemiskinan
Sumatera	4,8 – 5,6 %	7,89 – 5,76%
Jawa-Bali	5,4 – 5,7 %	7,73 – 5,80%
Nusa Tenggara	5,0 – 7,0 %	16,20 – 13,68%
Kalimantan	6,4 – 8,0 %	4,06 – 3,29 %
Sulawesi	6,0 – 8,0 %	9,02 – 7,20 %
Maluku	6,5 – 7,0 %	11,40 – 9,40 %
Papua	6,0 – 8,5 %	23,28 – 19,02 %

Sumber: Dokumen RPJMN 2020-2024

Strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan tersebut diterjemahkan menjadi koridor pembangunan yang terdiri dari dua jenis koridor, yaitu koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Strategi pemerataan disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satupun kelompok masyarakat (*leave no one behind*).

Bentuk nyata agenda pembangunan ini, diterjemahkan dengan program *major project*. Berikut adalah matriks *major project* yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV:

Tabel 3.5 Matriks *Major project*

No	Prioritas Nasional	Major Project	Manfaat Proyek	Indikator Poinstan (Triliun)	Pelaksana
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan	1. Indeks 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakakan Jadi, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Meningkatnya kontribusi industri dalam PDB menjadi 18,0% - 21,2%	Rp. 150,2 1 APBN/Rp 16,7 2 KPBU/Rp 0,0 3 Swasta/Rp 82,6	Kemangan, Kemendag, BPPU, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
		2. 3 Destinasi Pariwisata Unggulan Dunia (Toba, Borobudur DM), Lombok, Labuan Bajo, Bromo-TunggalGemeru, Wakatobi, Lingsang, dan Revitalisasi Bali	1. Meningkatkan kinerja sektor pariwisata menjadi 26 miliar USD (2024) 2. Meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara 300-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 26 juta hotel/tahun (2026)	Rp. 130,3 1 APBN/Rp 44,25 PUPN/Rp 7,20 2 KPBU/Rp 0,40 3 Swasta/Rp 94,23	Kemangan, KemenPUPN, Perind, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
		3. Penguatan Lintasan Usaha Serta ISO 30000/standar Pelani dan Nelayan	Meningkatnya pendapatan perkapita rata-rata 3,8% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 320 per tahun (target 300)	Rp. 200,7 1 APBN/Rp 200,7 (selanjutnya), dan Non K/L 2 Swasta/Rp 14	Kemangan, KSP, Kemendiknas, KemendikLRM, KemendikPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
		4. Peningkatan Energi Terbarukan ESDS Berbasis Kelapa Sawit	Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 18,5%	Rp. 101,1 1 APBN/Rp 18,1 2 BPPN/Rp 80 3 Swasta/Rp 25	Kemangan, KemendESDM, DPPIK, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kemiskinan dan Menjamin Pemerataan	1. Wilayah Adat Papua, Wilayah Adat Liris Pagan dan Wilayah Adat Dombary	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat pada 30 Kabupaten di Wilayah Adat Liris Pagan dan 11 Kabupaten di Wilayah Adat Dombary	Rp. 27,5 (APBN)	KemansPUPN, KemendESDM, Kemendagri, Kemangan, Kementerian Desa PDT, Kemenduk, Perind
		2. Perumahan Paus Bersama (Ruta Paku dan Sekelarnya, Pulau Lombok dan Sekelarnya, Serta Kawasan Perind Selat Sumda)	Meningkatnya infrastruktur perumahan ke-lisara dan pelayanan dasar di Kota Paku dan Sekelarnya, Pulau Lombok dan Sekelarnya, Serta Kawasan Perind Selat Sumda	Rp. 50,7 1 APBN/Rp 40,4 2 APBD/Rp 1,5 3 Hibah RR/Rp 1,1 4 Masyarakat dan Badan Usaha/Rp 5,2	DPPIK, Kemangan, KemansPUPN, Masyarakat, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

Sumber: Dokumen RPJMN 2020-2024

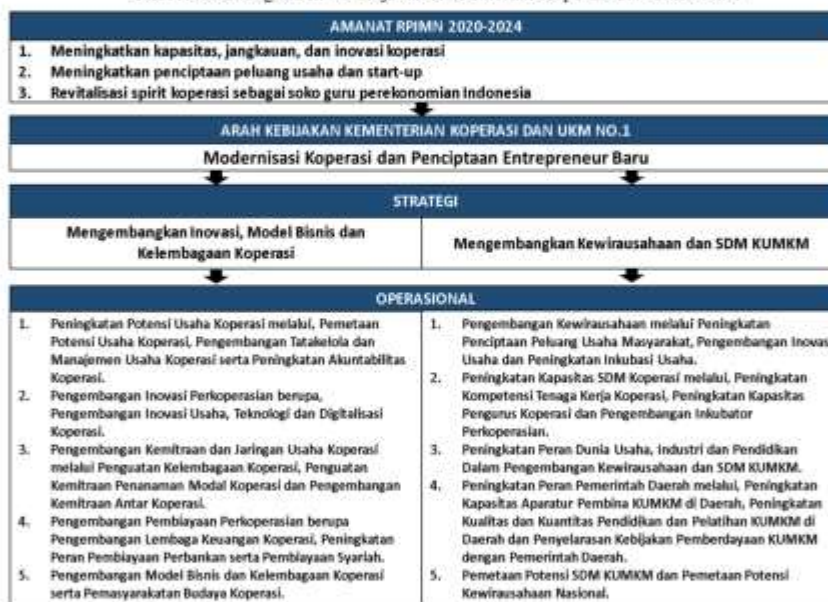
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 2020-2024

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional di bidang Koperasi dan UMKM tahun 2020-2024 serta sasaran prioritas Program Kerja Presiden tahun 2020-2024, maka Arah Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang akan dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024 terbagi ke dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu:

1. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan Wirausaha Baru (*New Entrepreneur*).

Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi RPJMN 2020-2024 yaitu, meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi serta meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Kerangka Arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM No.1



Selain itu, arah kebijakan ini juga menjabarkan misi Kementerian Koperasi dan UKM yang terkait dengan “Koperasi yang Modern”. Strategi yang akan ditempuh untuk melaksanakan arah kebijakan ini adalah :

- a. Mengembangkan Inovasi, Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi, dengan operasional:
 - 1) Peningkatan Potensi Usaha Koperasi melalui, Pemetaan Potensi Usaha Koperasi, Pengembangan Tatakelola dan Manajemen Usaha Koperasi serta Peningkatan Akuntabilitas Koperasi.
 - 2) Pengembangan Inovasi Perkoperasian berupa, Pengembangan Inovasi Usaha, Teknologi dan Digitalisasi Koperasi.

- 3) Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi, Penguatan Kemitraan Penanaman Modal Koperasi dan Pengembangan Kemitraan Antar Koperasi.
 - 4) Pengembangan Pembiayaan Perkoperasian berupa Pengembangan Lembaga Keuangan Koperasi, Peningkatan Peran Pembiayaan Perbankan serta Pembiayaan Syariah.
 - 5) Pengembangan Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi serta Pemasarakatan Budaya Koperasi.
- b. Mengembangkan Kewirausahaan dan SDM KUMKM melalui:
- 1) Pengembangan Kewirausahaan melalui Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha Masyarakat, Pengembangan Inovasi Usaha dan Peningkatan Inkubasi Usaha.
 - 2) Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi melalui, Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Koperasi, Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi dan Pengembangan Inkubator Perkoperasian.
 - 3) Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Pendidikan Dalam Pengembangan Kewirausahaan dan SDM KUMKM.
 - 4) Peningkatan Peran Pemerintah Daerah melalui, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina KUMKM di Daerah, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan Pelatihan KUMKM di Daerah dan Penyelarasan Kebijakan Pengembangan KUMKM dengan Pemerintah Daerah.
 - 5) Pemetaan Potensi SDM KUMKM dan Pemetaan Potensi Kewirausahaan Nasional.

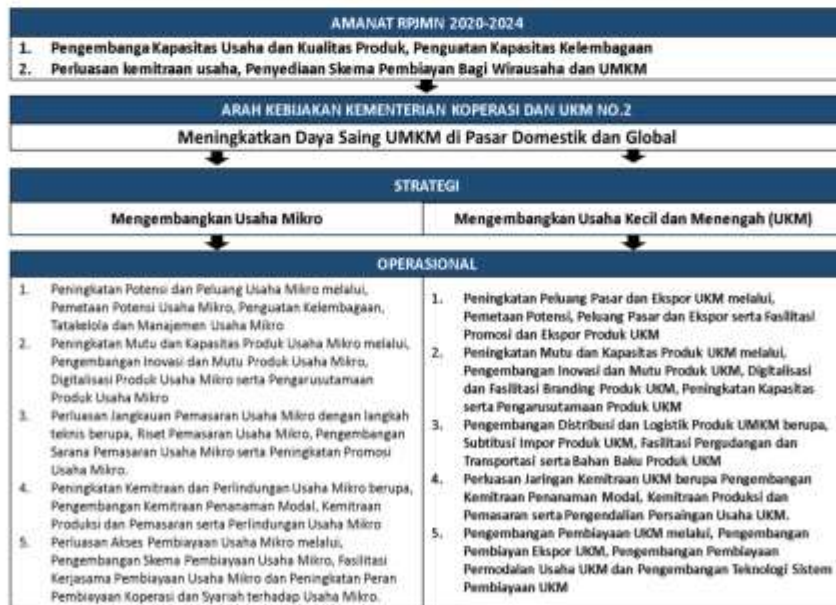
2. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global

Arah kebijakan ini selaras dengan strategi RPJMN tahun 2020-2024 yaitu, Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk, Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Perluasan Kemitraan Usaha serta Penyediaan Skema Pembiayaan Bagi Wirausaha dan UMKM. Selain itu, arah kebijakan ini juga menjabarkan misi “Mewujudkan UMKM Yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global”, yang akan dilaksanakan dengan strategi:

- a. Mengembangkan Usaha Mikro, dengan operasional:
- 1) Peningkatan Potensi dan Peluang Usaha Mikro melalui, Pemetaan Potensi Usaha Mikro, Penguatan Kelembagaan, Tatakelola dan Manajemen Usaha Mikro;
 - 2) Peningkatan Mutu dan Kapasitas Produk Usaha Mikro melalui, Pengembangan Inovasi dan Mutu Produk Usaha Mikro, Digitalisasi Produk Usaha Mikro serta Pengarusutamaan Produk Usaha Mikro;
 - 3) Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro dengan langkah teknis berupa, Riset Pemasaran Usaha Mikro, Pengembangan Sarana Pemasaran Usaha Mikro serta Peningkatan Promosi Usaha Mikro;

- 4) Peningkatan Kemitraan dan Perlindungan Usaha Mikro berupa, Pengembangan Kemitraan Penanaman Modal, Kemitraan Produksi dan Pemasaran serta Perlindungan Usaha Mikro; dan
 - 5) Perluasan Akses Pembiayaan Usaha Mikro melalui, Pengembangan Skema Pembiayaan Usaha Mikro, Fasilitasi Kerjasama Pembiayaan Usaha Mikro dan Peningkatan Peran Pembiayaan Koperasi dan Syariah terhadap Usaha Mikro.
- b. Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), melalui operasional:
- 1) Peningkatan Peluang Pasar dan Ekspor UKM melalui, Pemetaan Potensi, Peluang Pasar dan Ekspor serta Fasilitasi Promosi dan Ekspor Produk UKM;
 - 2) Peningkatan Mutu dan Kapasitas Produk UKM melalui, Pengembangan Inovasi dan Mutu Produk UKM, Digitalisasi dan Fasilitasi Branding Produk UKM, Peningkatan Kapasitas serta Pengarusutamaan Produk UKM;
 - 3) Pengembangan Distribusi dan Logistik Produk UMKM berupa, Substitusi Impor Produk UKM, Fasilitasi Pergudangan dan Transportasi serta Bahan Baku Produk UKM;
 - 4) Perluasan Jaringan Kemitraan UKM berupa Pengembangan Kemitraan Penanaman Modal, Kemitraan Produksi dan Pemasaran serta Pengendalian Persaingan Usaha UKM; dan
 - 5) Pengembangan Pembiayaan UKM melalui, Pengembangan Pembiayaan Ekspor UKM, Pengembangan Pembiayaan Permodalan Usaha UKM dan Pengembangan Teknologi Sistem Pembiayaan UKM.

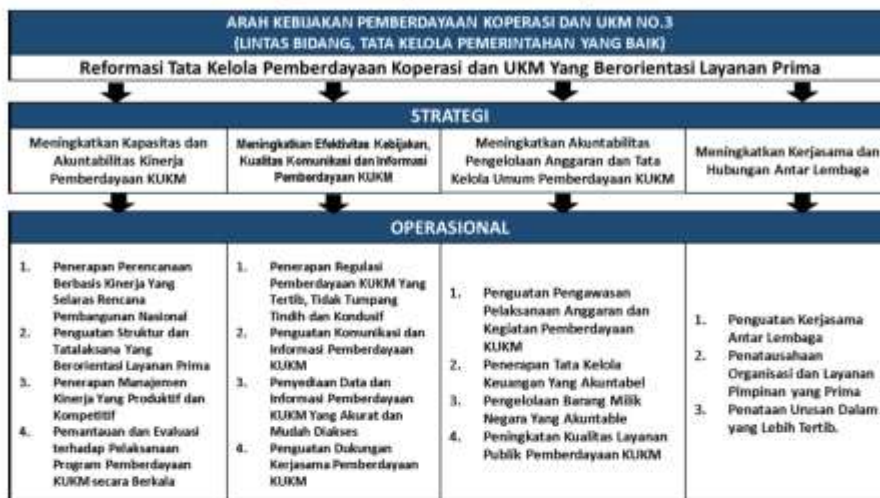
Tabel 3.7 Kerangka Arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM No.2



3. Reformasi Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UKM Yang Berorientasi Layanan Prima (Kebijakan Lintas Bidang).

Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi:

Tabel 3.8 Kerangka Arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM No.3



- Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pengembangan KUMKM, dengan operasional:
 - 1) Penerapan Perencanaan Berbasis Kinerja Yang Selaras Rencana Pembangunan Nasional;
 - 2) Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Keuangan;
 - 3) Penerapan Manajemen Kinerja Yang Produktif dan Kompetitif;
 - 4) Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengembangan KUKM secara Berkala.
- Meningkatkan Efektivitas Kebijakan, Organisasi dan Reformasi Birokrasi serta Kerjasama Pengembangan KUMKM, dengan operasional:
 - 1) Penerapan Regulasi Pengembangan KUMKM Yang Tertib, Tidak Tumpang Tindih dan Kondusif;
 - 2) Penerapan Organisasi yang Tepat Fungsi serta Tata Laksana Yang Berorientasi Layanan Prima;
 - 3) Penguatan Kerjasama Pengembangan KUMKM dengan Stakeholder.
- Meningkatkan Tata Kelola Umum Pengembangan KUKM, dengan operasional:
 - 1) Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tertib dan Akuntabel;
 - 2) Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Yang Transparan;
 - 1) Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pengembangan KUMKM
 - 2) Penatausahaan dan Layanan Pimpinan yang Prima
 - 3) Keprotokolan yang Profesional dan Ramah.

- d. Melakukan Penguatan Kapasitas Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM, melalui operasional:
- 1) Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM KUMKM
 - 2) Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Aparatur Pembina KUMKM
4. **Quick Wins**, merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat. Dalam rangka mendukung percepatan sasaran prioritas Program Kerja Presiden tahun 2020-2024. Dalam pidato seusai pelantikan tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa “Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja”. Selaras dengan pidato Presiden tersebut maka Quick Wins Deputy Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM diarahkan untuk “Menjadikan Koperasi sebagai Wadah Untuk Penciptaan Entrepreneur Baru”. Quick Wins ini dilaksanakan dengan strategi:
1. Pengembangan *Startup Coop* atau *Startup* berbasis Koperasi, dengan langkah teknis:
 - a. Pelatihan *Startup Coop* bagi para milenial kreatif; dan
 - b. Pengembangan Inkubator *Startup Coop* pada Koperasi Skala Menengah/Besar;
 2. Pengembangan Koperasi Wirausaha Santri, dengan langkah teknis:
 - a. Pelatihan *Role Model* Wirausaha Santri; dan
 - b. Pengembangan Inkubator Wirausaha pada Koperasi Pondok Pesantren.
 3. Pengembangan Model Koperasi Generasi Baru, dengan langkah teknis:
 - a. Pelatihan Perkoperasian bagi para pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. Fasilitasi Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi Generasi Baru.

3.3 FOKUS ARAH PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM SERTA PROGRAM STRATEGIS

Ketiga arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut akan dilaksanakan secara terarah dengan fokus Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Prioritas pengembangan KUMKM pada sektor riil (produksi) yang berorientasi ekspor dan substitusi impor;
2. Pengembangan KUMKM dilakukan dengan pendekatan komunitas, kelompok atau klaster berdasarkan sentra produksi;
3. Pengembangan dilakukan secara lintas sektoral dan mengedepankan kemitraan;
4. Pengembangan UMKM dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan level UMKM;
5. Modernisasi dan inovasi teknologi.

lima (5) strategi pengembangan Koperasi dan UMKM tersebut akan dilaksanakan melalui empat (4) agenda perubahan, yaitu:



Gambar 3.1 Agenda Perubahan
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

1. Integrasi UMKM dalam *Global Value Chains* (GVC);
2. Mendorong UMKM Naik Kelas (*Scaling Up*);
3. Melahirkan Wirausaha Baru (*New Entrepreneur*);
4. Modernisasi Koperasi.

Kementerian Koperasi dan UKM dalam upaya mengembangkan Koperasi dan UMKM telah mengintegrasikan berdasarkan kebijakan dan program melalui 3 (tiga) pilar dan 6 (enam) strategi. 3 (tiga) pilar tersebut, yaitu: 1) Kapasitas Usaha dan Kompetensi UMKM; 2) Lembaga Keuangan yang Ramah Bagi UKM; dan 3) Koordinasi Lintas Sektor Untuk Mendukung Ekosistem UMKM.

Berdasarkan pilar-pilar tersebut dan untuk merespon perubahan lingkungan eksternal global terdapat 3 (tiga) isu strategis yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2020-2024 meliputi: Peningkatan Ekspor, Penguatan Substitusi Impor dan UMKM dan Koperasi masuk dalam rantai pasok global (*Global Value Chain*). Untuk mengimplementasikan tujuan utama tersebut, maka diturunkan ke dalam 6 (enam) strategi yaitu: 1) Perluasan Akses Pasar; 2) Meningkatkan Daya Saing; 3) Pengembangan Kewirausahaan; 4) Akselerasi Pembiayaan dan Investasi; 5) Kemudahan dan Kesempatan Berusaha; dan 6) Koordinasi Lintas Sektor.

Bahwasanya pra pandemi covid-19, Kementerian Koperasi dan UKM sudah merancang 7 (tujuh) komoditas unggulan untuk menjadi prioritas dalam mendukung program dan kegiatan serta arah kebijakan, yaitu: 1) Pariwisata; 2) *Home Décor*; 3) Kuliner; 4) *Fashion*; 5) Ekonomi Kreatif; 6) Perikanan/Peternakan; dan 7) Pertanian/Perkebunan. Namun demikian, pasca pandemi covid-19 kondisi berubah sehingga diperlukan penyesuaian komoditas. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian Tahun 2020, bahwa komoditas selama pandemi covid-19 dapat diklasifikasikan kedalam *potential winners* dan *potential losers*. Sektor yang dikategorikan kedalam *Potential Winners*, antar lain: Tekstil dan Produk Tekstil, Kimia, Farmasi dan Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman, Elektronik, Jasa Telekomunikasi, Jasa Logistik. Sektor yang dikategorikan kedalam *Potential Losers*, antara lain: Pariwisata, konstruksi, Transportasi Darat, Laut, Udara, Pertambangan, Keuangan dan Otomotif. Lebih lanjut, produk yang diproyeksikan akan tumbuh signifikan di masa pandemik covid-19, yaitu pangan dan

kebutuhan dasar (*basic need*) lainnya, seperti: kebutuhan dasar manusia ataupun *green business* yang ramah lingkungan dan produk Non-Pangan yaitu: Usaha Berorientasi Industri Kreatif Berbasis IT, Jasa, Tekstil, Produk Tekstil dan Elektronik, antara lain: APD Non Medis, Alat Kesehatan Risiko rendah dan Bidang aplikasi dan games (*e-sport*). Secara ringkas sektor UMKM yang masuk kategori potential tersebut ditunjukkan pada gambar 3.2. berikut:



Gambar 3.2 Potential Winner dan Loser
 Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020

Lebih lanjut, sebagai salah satu fokus strategi dan pendekatan survival bagi UMKM dan Koperasi yang akan dikembangkan sebagai dasar pemikiran pengambilan strategi dan pendekatan kedepan, diuraikan sebagai berikut:



Gambar 3.3 Fokus Strategi dan Pendekatan Survival
 Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020

Sebagai upaya merancang arah program/kegiatan prioritas Kementerian Koperasi dan UKM, maka hal-hal tersebut di atas menjadi salah satu dasar pertimbangan menentukan kegiatan kedepan sekaligus mendukung rencana reaktivasi dan pemulihan usaha Koperasi dan UKM. Untuk itu, rancangan kegiatan prioritas Kementerian Koperasi dan UKM, meliputi:

1. Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UKM di bidang makanan dan minuman (kuliner);
2. Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UKM bidang ekonomi kreatif, jasa dan alat Kesehatan (APD);
3. Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UKM di bidang pertanian;
4. Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UKM di bidang perikanan;
5. Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UKM di bidang tekstil dan produk tekstil, terutama dibidang fashion;
6. Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UKM di bidang pariwisata terutama wisata berbasis wisata alam;



Gambar 3.3 Rancangan Kegiatan Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021
Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2020

Arah kegiatan prioritas tersebut di atas, bahwa Kementerian Koperasi dan UKM merupakan bagian terintegrasi dari kebijakan pengembangan nasional yang diarahkan guna mendukung ekspor Indonesia yang secara linear dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut diwujudkan melalui beberapa kegiatan aksi sebagai berikut:

1. Digitalisasi Koperasi dan UKM;
2. Pembangunan Koperasi yang terintegrasi dengan perhutanan sosial khususnya sektor pangan dan komoditas sawit;
3. Pembangunan *Trading House*;
4. Pembangunan sentra pemasaran produk UKM di daerah; dan
5. Pengembangan *Database* UKM.

3.4 KERANGKA REGULASI

Pembangunan nasional saat ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, perekonomian nasional disusun atas asas kekeluargaan dan diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, kebutuhan dan tantangan pembangunan nasional menjadi lebih kompleks, untuk itu diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Dalam rangka menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional, diperlukan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan perkembangan lingkungan yang dinamis serta mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Dengan jumlah Koperasi aktif mencapai 120.000 unit dan anggota mencapai 15.000.000 orang, hal tersebut dapat memberikan dampak signifikan dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat.

Meskipun telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun Koperasi dan UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, diperlukan suatu upaya dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta Koperasi dan UMKM. Penetapan kebijakan terkait Koperasi dan UMKM ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta dapat menjadi alat untuk memadukan program dan kebijakan seluruh pemangku kepentingan yang terkait secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan guna menciptakan ekosistem bagi tumbuhkembangnya Koperasi dan UMKM di Indonesia.

Pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Koperasi dan UKM dalam lima tahun mendatang akan didukung dengan penguatan kerangka regulasi yang disajikan pada tabel 3.9 yaitu mencakup:

Tabel 3.9 Kerangka Regulasi Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024

No	Area Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Analisis Regulasi Eksisting, Rاجan dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
1.	RUU tentang Cipta Kerja	Dalam rangka memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan kepada UMKM (Penguatan terhadap UU 25/1992 dan UU 20/2008)	Kementerian Koperasi dan UKM	Kemendik Praekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi dan UKM	pertengahan 2020 (sebelum wabah)
2.	RPP tentang Pengembangan dan Perlindungan UMKM	Sebagai amanat RUU Cipta Kerja, muatan substansi mengatur mengenai penguatan terhadap data tunggal UMKM, Pengelolaan Terpadu Kluster UMKM, kemitraan, kemudahan perizinan, akses kredit UMKM, definisi kriteria UMKM, DAK UMKM (Penguatan terhadap PP 17/2015)	Kementerian Koperasi dan UKM	Kemendik Praekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi dan UKM, dan 18 k/1 terkait.	3 bulan setelah RUU diadukan
3.	RPP tentang Perkoperasian	Sebagai amanat RUU Cipta Kerja, muatan substansi mengatur hal-hal baru yang belum diatur pada UU sebelumnya (UU 25/1992) maupun peraturan pelaksanaannya yaitu pendirian koperasi primer oleh 3 (tiga) orang, buku daftar anggota elektronik, rapai anggota melalui sistem kebarukharian, koperasi syariah (Penguatan terhadap PP 4/1994, PP 8/1995)	Kementerian Koperasi dan UKM	Kemendik Praekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi dan UKM	3 bulan setelah RUU diadukan
4.	RPERPRES tentang Pengembangan UMKM	Sebagai upaya memajukan dan merekoordinasi pembinaan UMKM oleh 18 sektor terkait, khususnya dalam rangka pembiayaan UMKM, rencana aksi yang berisi program dan kegiatan kementerian/lembaga	Kementerian Koperasi dan UKM	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemendik Praekonomian, dan 18 k/1 terkait	Desember 2020
5.	RUU tentang Perkoperasian	sebagai tindak lanjut putusan MK Nomor 26/PUU-IV/2013 yang membatalkan UU 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan membatalkan sementara UU 25/1992	Kementerian Koperasi dan UKM	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan	status kumulatif terbuka dan carry over dari progres 2015-2019
6.	RPERPRES tentang Perubahan Perpres 98/2014 tt. perizinan Usaha Mikro dan Kecil	Sebagai dampak terbitnya PP 34/2018 tt. DSS, seluruh perizinan termasuk izin usaha mikro dan kecil diatur melalui PP tersebut. Dalam hal ini Perpres 98/2014 berbentangan dengan PP 34/2018		Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM	

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, bahwa Kementerian Koperasi dan UKM masuk dalam kategori kelompok III, dengan wewenang tugas yaitu menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian kelompok III hanya memiliki fungsi untuk koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian yang artinya bahwa kewenangan dalam melaksanakan program dan kegiatan hanya sebatas pada koordinasi saja. Untuk itu, agar dapat melaksanakan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah, maka dipandang perlu disusun Peraturan Presiden terkait peran Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini menjadi salah satu prioritas kedepan yang mendorong penyusunan rancangan Peraturan Presiden untuk memperkuat peran Kementerian Koperasi dan UKM khususnya perihal Strategi Nasional Pengembangan UMKM, dimana Kementerian Koperasi dan UKM sebagai koordinator.

Lebih lanjut, kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pencapaian satuan strategis pengembangan UMKM Naik Kelas dan Modernisasi Koperasi, yaitu:

1. Pengembangan sistem basis data terpadu UMKM

Sumber daya yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam era globalisasi saat ini. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam rangka terpenuhinya database koperasi di Indonesia, maka Kementerian Koperasi dan UKM perlu melakukan membangun sebuah sistem database UMKM yang terintegrasi antar Kementerian/Lembaga yang juga membidangi UMKM, sehingga proses perolehan informasi berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Tujuan dari kegiatan Sistem Database UMKM Terintegrasi antar Kementerian/Lembaga ini adalah terciptanya sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam membangun sebuah database UMKM yang valid dan terkini secara online. Jika sistem pendataan UMKM secara online yang terintegrasi antar Kementerian/Lembaga berjalan dengan baik, maka pelayanan data dan informasi UMKM akan berjalan dengan baik dan pada gilirannya dapat digali atau dikembangkan potensi yang ada dalam rangka pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia. Selain itu, Permintaan data untuk perumusan kebijakan, perencanaan program serta monitoring dan evaluasi pada saat ini sudah semakin banyak. Disatu sisi, hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan pembangunan sudah dilaksanakan berbasis data empiris, meskipun demikian hal tersebut juga menjadi tantangan karena untuk memenuhi permintaan data dimaksud harus didukung dengan prasarana yang lengkap, sehingga kualitas data dapat ditingkatkan dan ketersediaannya tepat waktu serta akurat.

Jumlah UMKM yang besar dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak tersebut merupakan modal pokok dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi. Selain itu, Arahan Presiden tentang *Omnibus Law* Cipta Kerja tentang Pengembangan UMKM bukan hanya akan memberi kepastian Hukum bagi Pengembangan UMKM, akan tetapi lebih memberikan kemudahan dan keberpihakan lebih bagi pengembangan UMKM kedepan. Hal ini memberikan dukungan yang berarti bagi Kementerian Koperasi dan UKM untuk dapat mengambil peran dalam mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan pengembangan UMKM lintas Kementerian/Lembaga, diwujudkan melalui Strategi Nasional Pengembangan UMKM dan Satu Data.

Kementerian Koperasi dan UKM sebagai walidata untuk data Koperasi dan UMKM akan mengumpulkan dan mengolah data melalui Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RIPTIK). Data koperasi akan dikumpulkan dari Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota dan diolah menjadi suatu data terkini dan informatif yang diimplementasikan dalam beberapa format tampilan sesuai dengan kebutuhan, sedangkan untuk data UMKM sendiri Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan pihak yang terkoordinasi dalam forum Satu Data Indonesia.

2. Peningkatan fungsi LLP-KUKM sebagai layanan konsultasi terintegrasi

Pendirian LLP-KUKM bertujuan untuk memberikan layanan promosi dan pemasaran KUKM Indonesia yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana layanan informasi pasar, sarana pemasaran, promosi produk dan jaringan pemasaran serta distribusi produk KUKM, konsultasi pemasaran peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, serta inkubasi pemasaran. Dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas manajemen dan usaha Koperasi dan UKM, LLP-KUKM akan meningkatkan pelayanannya dengan mengembangkan konsultasi, pendampingan, coaching, seminar, menguatkan regional (satgas) dan menguatkan sentra-sentra produksi dengan menghadirkan ahli dan merekrut orang-orang terbaik untuk mendampingi UKM secara online maupun tatap muka tergantung kebutuhan, baik dari segi manajemen, produksi, pemasaran, keuangan dan SDM. Hal tersebut diharapkan dapat menjadikan LLP-KUKM (SMESCO) sebagai pusat pelayanan konsultasi, pendampingan dan kemitraan serta pintu akses pasar dan pembiayaan UKM yang dibina untuk memperoleh pembiayaan dari KUR, Lembaga Pengelola Dana Bergulir-KUMKM dan Indonesia Eximbank.

3. Penguatan sinergi dan kerjasama antar lembaga/pemangku kepetingan;

Untuk pemberdayaan koperasi dan UKM secara nasional, maka dipandang perlu dilakukan penyusunan kebijakan dan strategi nasional pemberdayaan koperasi dan UKM secara menyeluruh dan terpadu. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM secara umum diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan daya saing, serta revitalisasi pertanian dan perdesaan yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Program-program strategis koordinasi lintas sektor UMKM dan Koperasi yaitu melalui Strategi Nasional Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dan Satu Data.

4. Restrukturisasi Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Kementerian Koperasi dan UKM.

Kementerian Koperasi dan UKM memandang perlu untuk dilakukan restrukturisasi Struktur Organisasi dan Tata Kelola dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah fundamental dalam menyikapi bahwa organisasi selalu bersifat dinamis dan tidak sekedar membentuk struktur, tetapi lebih dari itu mengelola proses dalam struktur tersebut sehingga dapat diketahui berapa banyak struktur yang diperlukan. Transformasi yang dilakukan diharapkan dapat memberi nilai tambah pada organisasi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga struktur yang lebih ramping namun memiliki fungsi yang besar baik bagi Kementerian Koperasi dan UKM, lintas K/L, pemerintah daerah, masyarakat dan *stakeholder*. Secara umum, penataan

struktur organisasi Kementerian Koperasi dan UKM, diharapkan dapat menghasilkan:

- a. Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Lincah dan Cepat;
- b. Pengembangan Kualitas Koperasi Indonesia;
- c. Pengembangan Usaha Mikro;
- d. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Pengembangan Kewirausahaan dan Sumber Daya Manusia;
- f. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM baik Pusat maupun Daerah.

Struktur dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut, Kementerian Koperasi dan UKM semula terdiri atas 5 (lima) unit Deputi, yaitu:

- a. Deputi Bidang Kelembagaan;
- b. Deputi Bidang Pembiayaan;
- c. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran;
- d. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha;
- e. Deputi Bidang Pengembangan SDM.

akan menjadi 4 (empat) unit Deputi yaitu:

- a. Deputi Bidang Perkoperasian, yang mempunyai tugas:
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang peningkatan potensi usaha koperasi, pengembangan inovasi perkoperasian, pengembangan kemitraan dan jaringan usaha koperasi, pengembangan pembiayaan perkoperasian serta pengembangan koperasi baru;
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan potensi usaha koperasi, pengembangan inovasi perkoperasian, pengembangan kemitraan dan jaringan usaha koperasi, pengembangan pembiayaan perkoperasian serta pengembangan koperasi baru;
 - 3) Pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan di bidang peningkatan potensi usaha koperasi, pengembangan inovasi perkoperasian, pengembangan kemitraan dan jaringan usaha koperasi, pengembangan pembiayaan perkoperasian serta pengembangan koperasi baru;
 - 4) Pelaksanaan administrasi deputi bidang pengembangan koperasi; dan
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
- b. Deputi Bidang Usaha Mikro, yang mempunyai tugas:
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang peningkatan potensi dan peluang usaha mikro, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha mikro, perluasan jangkauan pemasaran usaha mikro, kemitraan dan perlindungan usaha mikro serta perluasan akses pembiayaan usaha mikro;
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan potensi dan peluang usaha mikro, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha mikro, perluasan jangkauan pemasaran usaha mikro, kemitraan dan perlindungan usaha mikro serta

- perluasan akses pembiayaan usaha mikro;
- 3) Pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan di bidang peningkatan potensi dan peluang usaha mikro, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha mikro, perluasan jangkauan pemasaran usaha mikro, kemitraan dan perlindungan usaha mikro serta perluasan akses pembiayaan usaha mikro;
 - 4) Pelaksanaan administrasi deputy bidang penguatan usaha mikro; dan
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri
- c. Deputy Bidang Usaha Kecil dan Menengah, yang mempunyai tugas yaitu:
- 1) Perumusan kebijakan di bidang peningkatan peluang pasar dan ekspor usaha kecil dan menengah, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha kecil dan menengah, pengembangan distribusi dan logistik usaha kecil dan menengah, perluasan jaringan kemitraan usaha kecil dan menengah serta pengembangan pembiayaan usaha kecil dan menengah;
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peluang pasar dan ekspor usaha kecil dan menengah, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha kecil dan menengah, pengembangan distribusi dan logistik usaha kecil dan menengah, perluasan jaringan kemitraan usaha kecil dan menengah serta pengembangan pembiayaan usaha kecil dan menengah;
 - 3) Pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan di bidang peningkatan peluang pasar dan ekspor usaha kecil dan menengah, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha kecil dan menengah, pengembangan distribusi dan logistik usaha kecil dan menengah, perluasan jaringan kemitraan usaha kecil dan menengah serta pengembangan pembiayaan usaha kecil dan menengah;
 - 4) Pelaksanaan administrasi deputy bidang penguatan usaha kecil dan menengah; dan
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
- d. Deputy Bidang Kewirausahaan, yang mempunyai tugas yaitu:
- 1) Perumusan kebijakan di bidang pemetaan potensi sumber daya manusia koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan peran pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri dan dunia pendidikan terhadap pengembangan kewirausahaan;
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan potensi sumber daya manusia koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan peran pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri dan dunia pendidikan terhadap pengembangan kewirausahaan;
 - 3) Pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan di bidang pemetaan potensi sumber daya manusia koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan peran pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri dan dunia pendidikan terhadap pengembangan kewirausahaan;
 - 4) Pelaksanaan administrasi deputy bidang pengembangan kewirausahaan;

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri.

BLU (Badan Layanan Umum) akan tetap sama, yaitu:

- a. LLP-KUKM (Lembaga Layanan Pemasaran – Koperasi dan UKM); dan
- b. LPDB-KUMKM ((Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi dan UMKM), yang penyaluran dana bergulirnya akan diarahkan pada Koperasi.

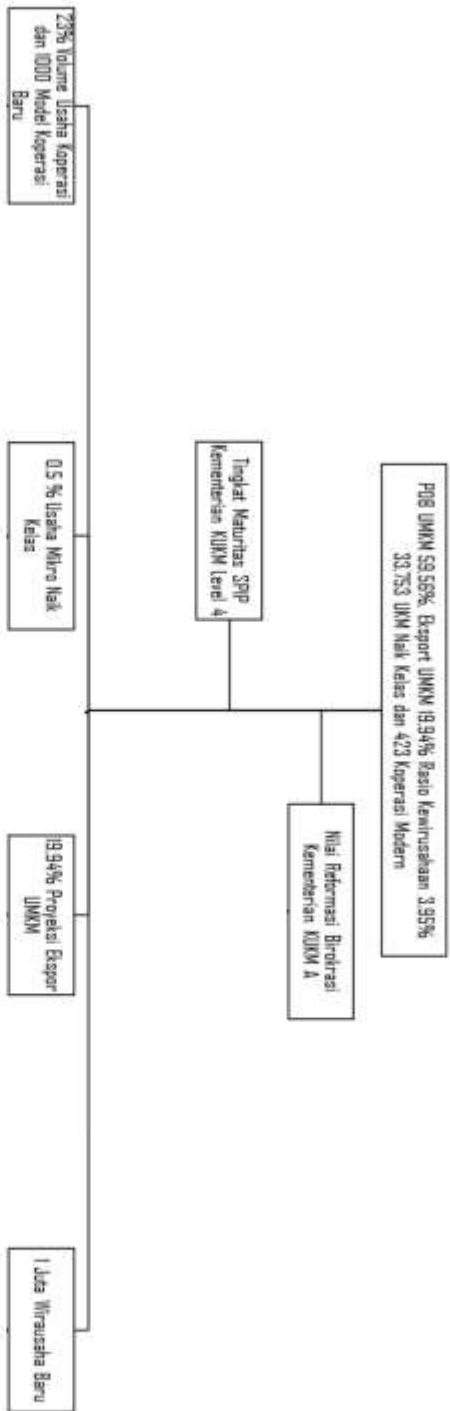
Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM yang sebelumnya terdiri dari:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Umum; dan
- c. Biro Keuangan;

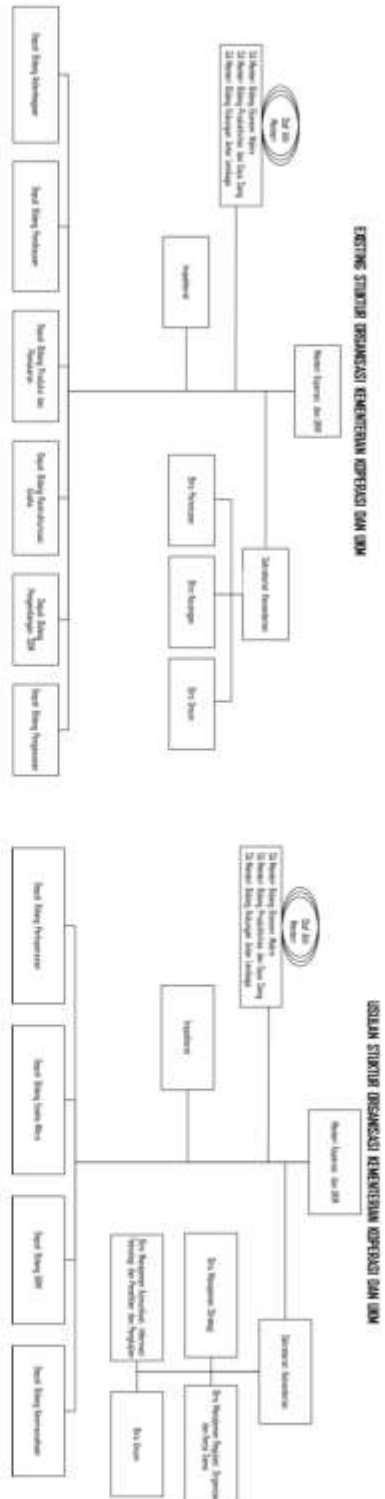
akan menjadi:

- a. Biro Manajemen Strategi, untuk memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip), akuntabilitas pengelolaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkungan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. Biro Manajemen Regulasi, Organisasi dan Kerja Sama, untuk memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif di bidang perumusan kebijakan, regulasi, hukum, organisasi dan kerjasama di lingkungan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. Biro Manajemen Komunikasi, Informasi Teknologi dan Penelitian dan Pengkajian, untuk memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif di bidang komunikasi, informasi dan teknologi di lingkungan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
- d. Biro Umum, untuk memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif di bidang kerumahtanggaan, keprotokolan, penatausahaan pimpinan dan pembinaan serta pengelolaan pegawai di lingkungan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah.

BAGAN 3.1. POHON KINERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2020-2024



BAGAN 3.2. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM



⁹⁾ Rancangan SOTK disusun berdasarkan

1. Surat Menteri Koperasi dan UKM nomor: 34/M.KU/UM/XII/2019 kepada Menteri Pengembangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Hasil Rapat Kementerian Koperasi dan UKM dengan Sekretariat Negara, Kementerian Pengembangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 5 Februari 2020;
3. Hasil Rapat Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Pengembangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 21 April 2020;
4. Draft Final Perpres SOTK, masuk ke Kementerian Pengembangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan penyempurnaan proses ke Sekretariat Negara pada tanggal 15 Mei 2020 2. Hasil Rapat Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Pengembangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 21 Februari 2020

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020-2024 menjabarkannya melalui:

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Indikator kinerja sasaran strategis 2020-2024

Perspektif Stakeholder				
Sasaran Strategis	Ukuran Hasil (Lag Indikator)	Ukuran Pemacu Kinerja (Lead Indikator)	Target 2024	Pengukuran
Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri dalam Mendukung Perkeonomian Nasional	Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Koperasi	Persentase Kontribusi PDB Sektor Koperasi	5%-6%	Mandiri atau BPS
	Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor UMKM	Persentase Kontribusi PDB Sektor UMKM	33,88%-59,56%	Mandiri atau BPS
Perspektif Customers				
Terwujudnya Koperasi yang Modern	Meningkatnya Inovasi Usaha Koperasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	20%-23%	Mandiri atau BPS
Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Meningkatnya Inovasi dan Produktivitas UKM	Persentase Total Nilai Ekspor UKM	9,49%-19,94%	Mandiri atau BPS
	Meningkatnya Skala Usaha UKM	Jumlah UKM Naik Kelas	33.753 UKM	Mandiri atau BPS

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

Tabel 4.2. Indikator kinerja sasaran strategis perspektif internal proses dan *learn & growth*

Perspektif Internal Process				
Sasaran Strategis	Ukuran Hasil (Lag Indikator)	Ukuran Pemacu Kinerja (Lead Indikator)	Target 2024	Pengukuran
Terwujudnya Modernisasi Koperasi (Pengembangan Koperasi)	Meningkatnya Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Model Baru	500-1000 Model Koperasi	Mandiri
	Meningkatnya Inovasi Usaha dan Teknologi Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi yang Berinovasi dan Memanfaatkan Teknologi	5%-10%	Mandiri atau BPS

Terwujudnya Penciptaan Entrepreneur Baru (Pengembangan Kewirausahaan)	Meningkatnya Wirausaha Baru	Rasio Kewirausahaan Nasional	3,55%-3,95%	Mandiri atau BPS
		Pertumbuhan <i>start-up</i> berbasis koperasi	700-3.500	Mandiri atau BPS
Terintegrasinya Produk UKM Kedalam <i>Global Value Chain</i> (Pengembangan UKM)	Meningkatnya Potensi Ekspor Produk UKM	Jumlah Produk UKM Yang Ekspor	7 Komoditas UKM	Mandiri atau BPS
Terwujudnya Peningkatan Skala Usaha Mikro (<i>Scaling Up</i>) (Pengembangan Usaha Mikro)	Meningkatnya Skala Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	0,5%	Mandiri atau BPS
Perspektif <i>Learn & Growth</i>				
Terwujudnya ASN Kementerian KUKM yang Profesional	Meningkatnya Profesionalisme ASN Kementerian KUKM	Indeks Profesionalisme ASN Kementerian KUKM	>90%	
Terwujudnya Sistem Data dan Informasi KUKM	Tersedianya Data dan Informasi Pengembangan KUKM yang Akurat dan Akuntabel	Persentase KUMKM yang Datanya Akurat dan Terkini	100%	Mandiri
Terwujudnya Birokrasi Kementerian KUKM yang Berorientasi Layanan Prima	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kementerian KUKM Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian KUKM	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian KUKM	≥ 80 (A)	Menpan-RB
		Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Koperasi dan UMKM	Level 4	BPKP
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengembangan Koperasi dan UMKM	>80	
Terwujudnya Pengelolaan Kinerja dan Anggaran yang Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian KUKM	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian KUKM	A	Menpan-RB
		Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian KUKM	WTP	BPK

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

2. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program, Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*) dan indikatornya.

Secara detail, Indikator Kinerja Program Teknis Tahun 2020 terdapat pada Tabel 4.3 dan untuk Indikator Kinerja Program Teknis Tahun 2021-2024 terdapat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Program Teknis Tahun 2020

PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2020
PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI			
	Terwujudnya Daya Saing dan Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Perekonomian	Persentase Jumlah Tenaga Kerja UMKM	5,5%
		Persentase Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/Provinsi, Primer Kab./Kota yang memiliki kategori sehat/berkualitas	33%
		Jumlah wirasaha nasional	10.000 Orang
		Persentase Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam Pembentukan PDB	7,5%
		Persentase Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam ekspor non-migas	7%
		Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi dalam investasi	10,5%
		Pertumbuhan Produktivitas UMKM	5%
		Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal	25%
		Jumlah UMKM dan Koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk	2.000 Unit
		Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan	55%
		Pertumbuhan jumlah anggota koperasi	10%
		Pertumbuhan volume usaha koperasi	18%
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI			
	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi (Induk/Nasional, sekunder/provinsi, Primer Kab./Kota yang memiliki kategori sehat/berkualitas)	
		Partisipasi Anggota Koperasi dalam Permodalan	

PROGRAM PENINGKATAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN BERBASIS USAHA MIKRO			
	Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang Berbasis Usaha Mikro	Persentase jumlah tenaga kerja UMKM	5,5%
		Persentase Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/Provinsi, Primer Kab./Kota yang memiliki kategori sehat/berkualitas	33%
		Persentase jumlah wirausaha nasional	10.000 Orang
		Persentase kontribusi Koperasi dan UMKM dalam pembentukan PDB	7,5%
		Persentase Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam ekspor non-migas	7%
		Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi dalam investasi	10,5%
		Pertumbuhan Produktivitas UMKM	5%
		Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal	25%
		Jumlah UMKM dan Koperasi yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk	2.000 Unit
		Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan	55%
		Pertumbuhan jumlah anggota koperasi	10%
		Pertumbuhan volume usaha koperasi	18%

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Program Teknis Tahun 2021 -2024

PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
PROGRAM KEWIRAUSAHAAN, UMKM DAN KOPERASI						
	Meningkatnya kapasitas manajemen koperasi	Jumlah koperasi model baru dan modern	150 Koperasi Modern	150 Koperasi Modern	100 Koperasi Modern	100 Koperasi Modern
	Meningkatnya inovasi koperasi	Pertumbuhan <i>start-up</i> berbasis koperasi	900 Koperasi	900 Koperasi	850 Koperasi	850 Koperasi
	Meningkatnya kemudahan dan kesempatan berusaha	Persentase kontribusi PDB sektor koperasi	2%	2%	1%	1%
	Meningkatnya Akses Pasar Produk dan Jasa UMKM	Persentase Total Nilai Potensi Ekspor UMKM	15,12%	17,28%	19,44%	21,60%
	Meningkatnya Daya Saing Produk dan Jasa UMKM	Persentase Jumlah UKM Naik Kelas	0,55%	1,35%	2,5%	4%
		Pertumbuhan Jumlah Tenaga UMKM	5%	8%	9%	10%
	Meningkatnya Akses Pembiayaan dan Investasi UMKM	Persentase Total Investasi UMKM	58%	61%	62%	63%
	Meningkatnya Kemudahan dan Kesempatan Berusaha	Persentase Kontribusi PDB Sektor UMKM	62,36%	63,73%	64,76%	65%

Indikator Kinerja Program Generik Tahun 2020 terdapat pada Tabel 4.5 dan untuk Indikator Kinerja Program Generik Tahun 2021-2024 terdapat pada Tabel 4.6

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Program Generik Tahun 2020

PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
			2020
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM			
	Meningkatnya efektivitas manajemen Kementerian Koperasi dan UMKM	Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM	80%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM	80%
		Persentase kontribusi Koperasi dan UMKM dalam pembentukan PDB	5,2%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM			
	Meningkatnya Dukungan Sarana Prasarana Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM	80%

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Program Generik Tahun 2021-2024

PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Tersedianya Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif	Indeks kualitas kebijakan pengembangan Koperasi dan UMKM	80%	80%	80%	80%
	Terselenggaranya Tata Kelola Pengembangan KUKM yang Partisipatif dan Berkelanjutan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengembangan Koperasi dan UMKM	A	A	A	A
	Terwujudnya ASN Kementerian KUKM yang Profesional dengan indikator kinerja	Indeks profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM	90%	90%	90%	90%
	Tersedianya Sistem Data dan Informasi Pengembangan KUKM yang Terintegrasi	Persentase Jumlah Unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM terintegrasi dengan sistem data dan informasi	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Birokrasi Kementerian KUKM yang Berorientasi Layanan Prima	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM	80	80	80	80
		Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Koperasi dan UMKM	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
	Terkelolanya Anggaran Pengembangan KUKM secara Akuntabel	Nilai SAKIP Kementerian Koperasi dan UKM	A	A	A	A
		Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM	WTP	WTP	WTP	WTP
	Tersedianya Operasional Kementerian Koperasi dan UKM	Jumlah Bulan Layanan Sarana Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan peningkatan daya saing koperasi dan UMKM pada tahun 2020-2024 mencakup:

1. Alokasi pendanaan jangka menengah Tahun 2020 diarahkan untuk membiayai pelaksanaan:
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM;
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM;
 - c. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro;
 - d. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi; dan
 - e. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi.
2. Alokasi pendanaan jangka menengah Tahun 2021-2024 diarahkan untuk membiayai pelaksanaan:
 - a. Program Dukungan Manajemen;
 - b. Program Pengembangan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan.
3. Sinergi dan kerja sama yang melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki program dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan Koperasi dan UMKM yaitu:
 - a. Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan pelaku usaha, antara lain: Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - b. Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan dan penguatan sistem pendukung bagi KUMKM baik terkait akses pembiayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, jaringan distribusi, kemitraan, serta penerapan standar kualitas produk, serta kebijakan lain yang terkait, seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Sertifikasi Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dll.
4. Pengembangan kerja sama pendanaan dengan Pemerintah Daerah dan dunia usaha juga dilakukan untuk meningkatkan dukungan bagi perbaikan daya saing KUMKM juga akan melibatkan Gerakan Koperasi termasuk Dekopin.

Dalam bagian sebelumnya telah diuraikan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun keberhasilan pencapaian target-target yang telah

ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan yaitu menggunakan indikator kinerja dan selanjutnya dalam mencapai target-target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Untuk itu, sumber dana yang diperlukan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dan realisasinya tergantung sepenuhnya dari APBN.

Secara terinci, kerangka pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan pada tahun 2020, 2001 dan 2022-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.7,4.8 dan 4.9 berikut:

Tabel 4.7 Kerangka Pendanaan Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2020			
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	Terciptanya koperasi dan UMKM dalam pedusunan kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan				972.337	Unit Sekretariat	
				55			
				100			
				10.000			
		Tenwujudnya koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan					75
							7
							10,5
							5
							25
		Tenwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Bertarafa Tinggi					80
			80				
			80				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM				216.954	1. Deputi Bidang Kelengkapan 2. Deputi Bidang Pembiayaan		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020		
	Meningkatnya efektivitas manajemen Kementerian Koperasi dan UKM					
	- Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM		80			
	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM		80			
	- Persentase kontribusi Koperasi dan UKM dalam pertumbuhan PDB (rata-rata/tahun)		7,5			
	Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM				4.640	Unit Sekretariat
	Meningkatnya kualitas rencana program dan kegiatan Kementerian KUKM					
	- Rencana Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM		100			
	- Forum Sinkronisasi Kebijakan dan Kerjasama Program Antar Pemangku Kepentingan		1			
	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Kerjasama Teknik				4.800	Unit Sekretariat
	Meningkatnya kualitas dan keterpaduan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan kerjasama Internasional					
	- Pemantauan dan Evaluasi Program Bidang KUMKM		1			
	- Kerjasama Internasional di Bidang Koperasi dan		1			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020		
	UMKM		1		
	- Peningkatan kapasitas kewirausahaan PUG				
Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran dan BMN				134.338	Unit Sekretaris
	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara				
	- Kinerja Pelaksanaan Anggaran		1		
	- Pelaporan Keuangan		1		
	- Barang Milik Negara		1		
	- Layanan Perkantoran		12		
	- Layanan Operasional Menteri		1		
Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah				7.500	Unit Sekretaris
	Terpenuhiya biaya pemeliharaan di pusat dan daerah				
	- Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran di Pusat dan Daerah		34		
Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan Administrasi Kepegawaian				9.051	Unit Sekretaris
	Tertaksananya Layanan Manajemen SDM Aparatur Kementerian Kooperasi dan UKM				
	- Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional		200		
	- Pembinaan dan pembekalan kompetensi SDM Aparatur		300		
	- Kerjasama Peningkatan SDM Aparatur		1		
	- Layanan administrasi kepegawaian		12		
	- Tanda jasa/penghargaan/ kehormatan		1		
	- Reformasi birokrasi		3		
	- Penyebaran informasi, penyuluhan dan pembinaan aparatur		4		
	- Perumusan bahan tetapan dan rekomendasi pimpinan		5		
Penyelenggaraan Ketatausahaan				6.380	Unit Sekretaris

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Meningkatnya Kualitas Ketertarikan dan Layanan Perkantoran		12		
	- Operasional Perkantoran dan Layanan Pimpinan		12		
	- Penyelenggaraan Organisasi dan Tatakelola		12		
	- Penyelenggaraan dan Layanan Peraturan		12		
	- Penyelenggaraan dan Pelayanan Kearsifan		12		
	- Penyelenggaraan Ketertarikan Menteri dan Ekelon I		12		
	Penyelenggaraan Kehumasan dan advokasi hukum			18.861	Unit Sekretaris
	Tertaksananya Layanan Hukum				
	- Advokasi Hukum		1		
	Tertaksananya Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi				
	- Kehumasan		1		
	- Open government informasi program dan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM		1		
	Koordinasi Penyusunan Regulasi Koperasi dan UMKM			3.200	Unit Sekretaris
	Tertaksananya Koordinasi Penyusunan Regulasi Koperasi dan UMKM				
	- Tertaksananya Koordinasi Penyusunan Regulasi Koperasi dan UMKM		3		
	- Meningkatkan kualitas pelayanan hukum		1		
	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Kelengkapan			3.850	Deputi Bidang Kelengkapan
	Tertaksananya Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monev kelengkapan				
	- Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan		1		
	- Monev, data dan pengembangan aparatur		1		
	- Layanan Internal		1		
	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Pembinaan			4.482	Deputi Bidang Pembinaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Kualitas, ketepatan dan kelengkapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan urusan pembiayaan		3		
	- Pelaksanaan Perencanaan, Program dan Anggaran, pelaporan dan kegiatan urusan umum serta sistem informasi pembiayaan Pelaksanaan				
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Produksi dan Pemasaran				4.050	Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
	Meningkatnya kualitas, ketepatan dan kelengkapan pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta kerjasama teknik		1		
	- Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monev Urusan Produksi dan Pemasaran		1		
	- Monev, data dan pengembangan aparatur		1		
	- Pengelolaan Layanan umum dan keuangan				
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Restrukturisasi Usaha				3.950	Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
	Tertaksananya Koordinasi, Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Restrukturisasi Usaha		2		
	- Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Restrukturisasi Usaha				
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Pengembangan SDM				3.550	Deputi Bidang Pengembangan SDM
	Tertaksananya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Pengembangan SDM		3		
	- Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Pengembangan SDM				
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Pengawasan Koperasi				4.300	Deputi Bidang Pengawasan
	Layanan Internal Deputi Bidang Pengawasan				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Output/Indikator)	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020		
	- Layanan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		2		
	- Layanan Keuangan dan Tatausaha		2		
	- Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi		1		
	- Partisipasi Dalam Forum APEC dan Kerjasama dengan Korea		1		
Pengembangan Sistem Informasi dan Data					Unit Sekretariat
	Meningkatnya kelengkapan dan kualitas sistem informasi dan data Koperasi dan UMKM		1		
	- Database Koperasi dan UMKM		1		
	- Sistem Jaringan Informasi		1		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM					
	Meningkatnya Dukungan Sarana Prasarana Kementerian Koperasi dan UKM			95.480	1. Deputi Bidang Kelengkapan 2. Deputi Bidang Pembiayaan 3. Deputi Bidang Produksi dan pemasaran 4. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha 5. Deputi Bidang Pengembangan SDM 6. Deputi Bidang Pengawasan, 7. LLP-KUKM 8. Unit Sekretariat
	- Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM		80		
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Kementerian Koperasi dan UKM					
				70.280	1. Deputi Bidang Kelengkapan 2. Deputi Bidang

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	2020	
	Terperluhnya Sarana dan Prasarana di Kementerian Koperasi dan UKM		1			1. Deputi Bidang Kebudayaan 2. Deputi Bidang Pembinaan 3. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 4. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha 5. Deputi Bidang Pengembangan SDM 6. LPD8-KUMKM 7. LPD-KUMKM
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Koperasi dan UKM					
	Sarana Prasarana LLP-KUMKM				25.200	LLP-KUMKM
	Terperluhnya Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan		2.500			
	- Penyelesaian Sarana dan Prasarana Pemerintahan		12			
	- Layanan Pemerintahan					
	Program Peningkatan Daya Saling UMMKM dan Koperasi				546.976	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020		
	Terwujudnya Daya Saing dan Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Perekonomian				B. Unit Sekretariat
	- Persentase Jumlah Tenaga Kerja UMKM		5,5		
	- Persentase Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/Primer, Kab./Kota yang memiliki kategori sehat/berkualitas		33		
	- Jumlah wirasaha nasional		10.000		
	Terwujudnya Daya Saing dan Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Perekonomian.				
	- Persentase Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam Pembentukan PDB (rata-rata/tahun		2,5		
	- Persentase Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam ekspor non-tigas (rata-rata/tahun)		7		
	- Persentase Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam investasi (rata-rata/tahun)		10,5		
	- Pertumbuhan Produktivitas UMKM (rata-rata/tahun)		5		
	- Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal		25		
	- Jumlah UMKM dan Koperasi yang menerapkan standar/kategori mutu dan sertifikasi produk		2.000		
	- Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan		55		
	- Pertumbuhan jumlah anggota koperasi		10		
	- Pertumbuhan volume usaha koperasi		18		
Dukungan Pembedayaan KUMKM di Daerah					
Tertaksananya Dukungan Pembedayaan KUMKM di Daerah					
	- Pertugas penyalah koperasi lapangan (PPKL)		1.035		
	- Operasional PLUT di Daerah		66		
	- Fasilitas Pemoran dan Promosi KUMKM di Daerah		34		
				128.267	Unit Sekretariat

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Output/Indikator)	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020		
	- Perencanaan program Kementerian Koperasi dan UKM		12		
	- Monitoring dan evaluasi kegiatan strategis		10		
	- Pengembangan data KUMKM		10		
	- Sertuan tugas pengawasan koperasi		1212		
	- Monitoring dan Insentif Pendamping Izin Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Daerah		188.000		
Penguatan Koperasi dan UMKM Yang Menghasilkan Produk Ramah Lingkungan				3.000	Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
	Meningkatnya pengembangan usaha produktif oleh koperasi melalui pematiran energi terbarukan				
	- Jumlah Koperasi yang didampingi dalam pengembangan eco tourism		30		
Perluasan Pembiayaan dan Jasa Keuangan Non Bank dan Advokasi Perumahan Bagi Koperasi dan UMKM				1.831	Deputi Bidang Pembiayaan
	Kapasitas dan Jangkauan Layanan Keuangan Non Bank Bagi KUMKM		6		
	- Perumbuhan dan Penguatan Badan Layanan Umum Daerah				
	- Advokasi Perumahan		750		
	- Desain skema pembiayaan KUMKM		300		
	- Pengembangan skema resi gudang melalui pembiayaan LPDB KUMKM		50		
fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil				31.000	Deputi Bidang Pembiayaan
	Akses KUMKM Pada Permodalan				
	- Wirasaha Pemula Yang Didukung Modal Awal Usaha (Start Up Capital)		3.135		
	- Koperasi yang diperkuat untuk pengembangan usaha melalui kemitraan		5		
	- Evaluasi dampak Pemberian Modal Awal Usaha		3.135		
	- Skema UMKM bisnis start up melalui LPDB		50		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Output/Indikator)	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020		
	KUMKM diperkuat dengan dana cadangan melalui bantuan pemerintah				
Penerapan Peraturan Perundangan di Bidang Koperasi dan UMKM				2.500	Deputi Bidang Kelembagaan
	Meningkatnya penerapan peraturan perundang-undangan				
	- Analisis / evaluasi peraturan perundangan		25		
	- Sosialisasi peraturan perundangan bagi koperasi dan UMKM		34		
	- Dokumentasi peraturan perundang-undangan		10		
Perluasan dan Peningkatan Akses Pemasaran				17.047	Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
	Meningkatnya Promosi Dan Pemasaran Dalam Negeri				
	- Promosi dan pemasaran dalam negeri		500		
	Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Luar Negeri				
	- Jumlah KUMM yang mengikut pameran luar negeri		50		
	Meningkatnya Fasilitas penerapan e-commerce				
	- Jumlah KUMM yang difasilitasi penerapan e-commerce		500		
Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Investasi				6.400	Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
	Meningkatnya profesionalisme dan keberlanjutan usaha UMKM dan koperasi				
	- Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang difasilitasi kemitraan dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)		500		
	- KUMK yang diperkuat dalam kemitraan rantai nilai/pasok		500		
	- Pemanfaatan dan Ekspansi Kemitraan KUMK dengan UMB		500		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Output/Indikator)	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020		
Pengembangan Kewirausahaan	Berkembangnya wirausaha baru yang berpotensi tumbuh naik kelas		1.500	46.049	Deputi Bidang Pengembangan SDM
	- Peserta pada syarikat dan kewirausahaan				
	Meningkatnya ratio jumlah wirausaha dan mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar				
	- Jumlah Peserta pelatihan Kewirausahaan		5.300		
Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	Meningkatnya kualitas SDM koperasi dan UKM dalam mendukung usaha koperasi dan UKM yang berkelanjutan		5.000	48.783	Deputi Bidang Pengembangan SDM
	- Pelatihan Perkapasian bagi Pengurus dan Manajer Koperasi		5.500		
	- Peserta pelatihan vocational		2.500		
	- Pelatihan Perkapasian Syariah bagi Pengurus dan Manajer Koperasi				
Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi SDM KUKM					
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan dilak UMKM dalam mendukung perbaikan kualitas SDM UMKM		3.000	22.766	Deputi Bidang Pengembangan SDM
	- Jumlah SDM koperasi dan UKM yang difasilitasi melalui SKKW		1.000		
	- Jumlah Peserta pelatihan pengelola UKM berbasis kompetensi		720		
	- Jumlah Peserta pelatihan manajemen berbasis kompetensi		1		
	- Jumlah SKKW yang dikembangkan		1		
Peningkatan Standarisasi Mutu dan Sertifikasi Produk				7.454	Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020		
	Meningkatnya kualitas dan daya saing produk UMKM dan koperasi					
	- KUMKM yang difasilitasi Standarisasi Mutu dan Sertifikasi Produk untuk meningkatkan nilai tambah dan mendukung Pariwisata		3.000			
	- KUMKM yang difasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi Produk potensial ekspor		1.000			
	Meningkatnya KUMKM yang difasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk untuk ekspor					
	- Jumlah KUMKM yang difasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk untuk ekspor		1.500			
Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan usaha terpadu KUMKM dalam rangka mendukung promosi citra produk, pusat promosi dan pameran, serta pendampingan bagi koperasi dan UMKM				21.350	Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
	- Sarana pemasaran layanan usaha terpadu		70			
	- Fasilitas dan Konver layanan usaha terpadu		79			
	- Penguatan Kelembagaan dan Pendampingan PLUT					
Pengelolaan Dana Bergulir	Meningkatnya volume dan kualitas penyuluran dana bergulir bagi KUMKM				163.606	LPDB-KUMKM
	- Analisa Penyuluran Dana Bergulir		12.000			
	Meningkatnya dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana					
	- Jumlah dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana		69			
Ayunan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM	Meningkatnya peran LLP sebagai trading house KUMKM dalam rangka mendukung pemasaran dan promosi produk dalam negeri secara terpadu				35.472	LLP-KUMKM

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020		
	[Quick Wins]					
	- Trading House Koperasi dan UMKM		2.500			
	- Fasilitas promosi dan pemasaran produk UMKM dan Dukungan Manajemen Layanan Perkantoran		12			
	- Dukungan Manajemen dan Layanan Perkantoran		12			
	Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Perkantoran					
	- Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Perkantoran		1			
	Pengembangan Investasi Usaha				1.500	Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
	Meningkatkan profesionalisme dan keberlanjutan usaha UMKM dan koperasi					
	- Koperasi dan UMKM yang difasilitasi kerjasama investasi		400			
	- Fasilitas Pencadangan Usaha bagi UMKM		200			
	- Koperasi yang difasilitasi sistem resi gudang		4			
	Pemetaan Kondisi dan Peluang Usaha KUMKM				1.500	Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
	Meningkatkan kualitas skema dan jangkauan usaha koperasi dan UMKM secara berkelanjutan					
	- Penerapan dan pemetaan early warning system untuk restrukturisasi usaha koperasi dan UMKM		500			
	- Penerapan standarisasi restrukturisasi usaha koperasi dan UMKM		300			
	- Penerapan skema restrukturisasi usaha koperasi dan UMKM		150			
	Penguatan Koperasi dan UMKM di Bidang Keuangan Syariah				1.250	Deputi Bidang Pembinaan
	Kapasitas dan Jangkauan Layanan Pembayaran / Keuangan Syariah					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Output/Indikator)	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020		
	- Regulasi kebijakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan oleh koperasi dengan prinsip syariah		3		
	- Kerja Sama Usaha Antar Lembaga Pembiayaan / Keuangan Syariah		3		
	- KSPS/USPPS Koperasi yang terfasilitasi literasi dan peminubarannya		300		
	- Penguatan manajemen koperasi melalui Dewan Pengawas Syariah Koperasi yang memperoleh bantuan sertifikat DSN MUI		150		
	- Pendayagunaan Sumber - Sumber Pembiayaan Syariah		300		
	- Wirusaha baru yang didampingi dan dana Ziswaf KSPS/USPPS Koperasi		300		
Perlindungan Usaha KUMKM					
	Meningkatnya pengembangan usaha koperasi dan UMKM yang berkelanjutan			3.500	Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
	- Koperasi dan UMKM yang difasilitasi advokasi manajemen dan keuangan		100		
	- Koperasi dan UMKM yang didampingi dalam penanganan dampak globalisasi		100		
	- Koperasi dan UMKM yang difasilitasi penanganan dampak bencana		300		
	- Registrasi pengusaha skala mikro dan kecil		50.500		
Penelitian dan Pengkajian Kebijakan di Bidang Koperasi dan UMKM					
	Meningkatnya jumlah dan kualitas rekomendasi dari hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan kebijakan, program dan kegiatan di bidang UMKM dan koperasi			3.697	Deputi Bidang Pengembangan SDM
	- Penelitian dan pengkajian koperasi		4		
	- Penelitian dan pengkajian UMKM		4		
	- Penelitian dan pengkajian Sumber Daya		4		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	2020	
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi - Perentase Koperasi (Induk/No Sanael, sekunder/provinsi, Primer Kab/Kota yang memiliki kategori sehat/berkualitas) Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi - Partisipasi Anggota Koperasi dalam Pemrodalan				26.925	1. Deputi Bidang Kelembagaan 2. Deputi Bidang Pembinaan 3. Deputi Bidang Pengawasan 4. Dekopin
Penguatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi						
	Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Usaha Simpan Pinjam Koperasi				1.250	Deputi Bidang Pembinaan
	- Regulasi kebijakan usaha simpan pinjam oleh koperasi		3			
	- Pengembangan Kerjasama Antar Usaha Simpan Pinjam Koperasi		3			
	- KSP/USP Koperasi yang diperkuat kelembagaan dan usahanya		300			
	- Penguatan manajemen koperasi melalui Pengelola KSP/KSP PS yang memperoleh bantuan sertifikasi SKKN		500			
	- Advokasi Literasi dan Penumbuhan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi		500			
	- Advokasi kerja sama antar usaha simpan pinjam koperasi					
	- KSP/USP Koperasi yang teradvokasi kelembagaan dan usahanya					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020		
Penataan Organisasi dan Badan Hukum Koperasi						
	Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui penataan organisasi dan badan hukum koperasi		1		1.500	Deputi Bidang Kelembagaan
	- Penataan badan hukum, anggaran dasar koperasi, dan jin usaha koperasi					
	- Penggabungan, Peleburan dan Pembubaran Koperasi		200			
	- Sosialisasi dan Fasilitas Akta Pendaftaran Koperasi yang anggotanya dari pengusaha mikro		200			
	- Tindak Lanjut Penggabungan, Peleburan dan Pembubaran Koperasi		1			
Peningkatan Keanggotaan Koperasi						
	Peningkatan keanggotaan koperasi				1.150	Deputi Bidang Kelembagaan
	- Kaderisasi Perkeperasaan di Kalangan Pemuda (Lab Perkeperasaan)		5			
	- Advokasi partisipasi anggota dalam permukiman dan usaha koperasi		200			
	- Advokasi partisipasi perorangan oleh anggota		200			
Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi						
	Jumlah pemeriksaan kelembagaan koperasi				1.640	Deputi Bidang Pengawasan
	- Pemeriksaan Organisasi, Kinerja dan Laporan Keuangan		20			
Peningkatan Tata Laksana Koperasi dan UMKM						
	Tertaksananya peningkatan tatalaksana koperasi dan UMKM				1.350	Deputi Bidang Kelembagaan
	- Peningkatan manajemen koperasi perkotaan dan perdesaan		350			
	- Penerapan tata kelola UMK yang baik		300			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020		
Penguatan Kontribusi Gerakan Koperasi	- Penerapan advokasi akurabilitas koperasi		300		14.500	Dekopin
	Meningkatnya kualitas keanggotaan koperasi dan tata kelola KUMKM					
	- Revitalisasi Koperasi Perdesaan		600			
	- Promosi dan Advokasi Anggota Koperasi		3.000			
	- Jaringan Usaha Koperasi		400			
	- Dukungan Kegiatan DEKOPIN, DEKOPINML, DEKOPIMDA		500			
Penerapan Kepatuhan Koperasi				1.440	Deputi Bidang Pengawasan	
	Meningkatnya kepatuhan koperasi					
	- Penerapan Sistem dan Kriteria Kepatuhan Koperasi		20			
Penilaian Kualitas dan Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi				1.440	Deputi Bidang Pengawasan	
	Jumlah Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi					
	- Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi		30			
Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam				1.440	Deputi Bidang Pengawasan	
	Jumlah Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi					
	- Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Konvensional		20			
Penanganan Rekomendasi Pasca Pemeriksaan Koperasi dan Usaha Simpan Pinjam				1.215	Deputi Bidang Pengawasan	
	Pemantauan dan Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Koperasi					
	- Penanganan dan Pemantauan Hasil Pemeriksaan Koperasi		25			
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro				81.781	1. Deputi Bidang Kelembagaan	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020		
	Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang Berbasis Usaha Mikro					2. Deputi Bidang Pembiayaan 3. Deputi Bidang Produk dan Pemasaran 4. Deputi Bidang Pengembangan SDM 5. Unit Sekretariat
	- Persentase jumlah tenaga kerja UMKM (rata-rata/tahun)		5,5			
	- Persentase Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/Provinsi, Primer Kab./Kota yang memiliki kategori sehat/berkualitas)		33			
	- Persentase jumlah wirawusaha nasional		10.000			
	Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang Berbasis Usaha Mikro.					
	- Persentase kontribusi koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan PDB (rata-rata/tahun)		7,5			
	- Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi dalam ekspor non-migas (rata-rata/tahun)		7			
	- Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi dalam investasi (rata-rata/tahun)		10,5			
	- Pertumbuhan Produktivitas UMKM (rata-rata/tahun)		5			
	- Proporsi UMKM yang mengkses pembiayaan formal		25			
	- Jumlah UMKM dan Koperasi yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk		2.000			
	- Partisipasi anggota koperasi dalam pemodal alan		35			
	- Pertumbuhan jumlah anggota koperasi		10			
	- Pertumbuhan volume usaha koperasi		18			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome/Sasaran Kegiatan) (Output/Indikator)	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
Penguatan Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor Pertanian dan Perkebunan	Meningkatnya pengembangan, produktivitas dan keberlanjutan perusahaan produk unggulan daerah berbasis koperasi/sentra usaha mikro di Sektor Pertanian dan Perkebunan - Koperasi/Sentra Usaha Mikro bidang Pertanian dan perkebunan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui Kemitraan		50	2.572	Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
Penguatan Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor Perikanan dan Peternakan	Meningkatnya pengembangan, produktivitas dan keberlanjutan perusahaan produk unggulan daerah berbasis koperasi/sentra usaha mikro di sektor Perikanan dan Peternakan - Jumlah Koperasi/UKM yang diperkuat kapasitas usaha melalui Kemitraan		92		
	Meningkatnya Koperasi/UKM sektor peternakan dan pengolahan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan - Jumlah Koperasi/UKM sektor peternakan dan pengolahan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui Kemitraan		36		
Pengembangan SDM Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi					
	Meningkatnya kualitas SDM usaha mikro dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan - SDM UKM yang mendapat fasilitasi magang - Fasilitasi ide usaha melalui kompetisi dan inkubasi		2.500 30	4.714	Deputi Bidang Pengembangan SDM
Peningkatan Akses KUMKM pada Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal					
				8.959	1. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020		
	Meningkatnya Akses KUMKM pada Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal		6		2. Deputi Bidang Pembiayaan
	- Penumbuhan dan penguatan lembaga Penjaminan Kredit Daerah				
	- Usaha Mikro Sektor Prioritas Yang Didampingi Mengakses dan Mengelola Pembiayaan/Kredit KUR		15.000		
	- Usaha Mikro Yang Mendapat Pendampingan Sertifikasi Tanah		15.245		
	- Koperasi yang dapat mengakses fasilitasi Asuransi		50		
	- Koperasi dan Usaha Menengah Yang Mendapatkan Akses Pendanaan Melalui Pasar Modal		100		
	Penguatan Sistem Bisnis Koperasi Sentra Usaha Mikro di Sektor Industri dan Jasa			4.218	Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
	Meningkatnya pengembangan, produktivitas dan keberlanjutan perusahaan produk unggulan daerah berbasis koperasi/sentra usaha mikro di sektor industri dan jasa		30		
	- Koperasi/Sentra Usaha Mikro bidang Industri dan jasa yang diperkuat kapasitas usahanya melalui Kemitraan		20		
	- Koperasi/Sentra Usaha Mikro Industri dan jasa yang diperkuat sistem bisnis		20		
	Meningkatnya Koperasi/UKM sektor Industri kreatif dan pengetahuan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan		20		
	- Meningkatkan Koperasi/UKM sektor Industri kreatif dan pengetahuan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan		20		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro			57.685	Deputi Bidang Produksi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana dan Pemasaran
			2020		
	Meningkatnya akses pemasaran usaha informal dan fungsi pasar rakyat yang direvitalisasi		54		
	- Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola Koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana				
	- Pedagang skala mikro informal / pedagang kaki lima yang difasilitasi penataan lokasi dan promosi		34		
	- Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola Koperasi		100		
	Meningkatnya akses pemasaran usaha informal dan fungsi pasar rakyat yang direvitalisasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Pasca Bencana				
	Meningkatnya pedagang Skala Mikro Informal/Pedagang Kaki Lima yang Difasilitasi Penataan Lokasi, Sarana Usaha dan Promosi di Daerah				
	Penyuluhan dan Pendampingan Perkoprasian			3.850	Deputi Bidang Kelembagaan
	Meningkatnya penyuluhan dan pendampingan perkoprasian				
	- Jumlah Pengembangan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Melalui Pendampingan Koperasi		1.235		
	- Jumlah Penambahan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan		150		
	- Jumlah Penyuluhan Perkoprasian Kepada Kelompok Masyarakat Strategis		500		
	- Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pembinaan		400		
	- Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pembinaan				
	- Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pembinaan				
	- Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pembinaan				

Tabel 4.8 Kerangka Pendanaan Tahun 2021

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2021		
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM						
	Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan				972.337	Unit Sekretariat
	- Persentase Jumlah Tenaga Kerja UMKM		55			
	- Persentase Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/Provinsi, Primer Kab/Kota yang memiliki kategori sehat/berkualitas)		100			
	- Persentase Jumlah wiraswasta nasional		10.000			
	Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan					Unit Sekretariat
	- Persentase kontribusi Koperasi dan UMKM dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun)		75			
	- Persentase Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun)		7			
	- Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi dalam investasi (rata-rata/tahun)		10,5			
	- Pertumbuhan Produk Bruto UMKM (rata-rata/tahun)		5			
	- Proporsi UMKM yang mengkses pembiayaan formal tingkat Rp.1Mn (%)		25			
	Tenwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkualitas Tinggi					Unit Sekretariat
	- Indeks reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM		80			
	- Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Koperasi dan UKM		80			
Program Dukungan Manajemen						
					216.954	1. Deputi Bidang Kelembagaan 2. Deputi Bidang Pembinaan B. Deputi Bidang Produktif dan Pemasaran

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2021	2021	2021	
	Meningkatnya elektivitas manajemen Kementerian Koperasi dan UKM						4. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha 5. Deputi Bidang Pengembangan SDM 6. Deputi Bidang Pengawasan 7. Unit Sekretariat
	- Indeks Performansi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM		80				
	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM		80				
	- Persentase kontribusi Koperasi dan UMKM dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun)		7,5				
Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM	Meningkatnya kualitas rencana program dan kegiatan Kementerian KUM				4.640	Unit Sekretariat	
	- Rencana Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM		100				
	- Forum Sinergisasi Kebijakan dan Kerjasama Program Antar Pemangku Kepentingan		1				
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Kerjasama Teknik	Meningkatnya kualitas dan ketepatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan kerjasama internasional				4.801	Unit Sekretariat	
	- Pemantauan dan Evaluasi Program Bidang KUMKM		1				
	- Kerjasama internasional di Bidang Koperasi dan UMKM		1				
	- Peningkatan kapabilitas KUMKM		1				
Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran dan BMM	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan				134.338	Unit Sekretariat	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2021		
	Barang Milk Negara		1		
	- Kinerja Pelaksanaan Anggaran				
	- Pelaporan Keuangan		1		
	- Barang Milk Negara		1		
	- Layanan Perkantoran		12		
	- Layanan Operasional/Mentori		1		
Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah				7.500	Unit Sekretariat
	Terpenuhiya layanan pemeriksaan di pusat dan daerah				
	- Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran di Pusat dan Daerah		34		
Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan Administrasi Kepegawaian				9.051	Unit Sekretariat
	Tertersedianya Layanan Manajemen SDM Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM				
	- Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional		200		
	- Pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur		300		
	- Kerjasama Peningkatan SDM Aparatur		1		
	- Layanan administrasi kepegawaian		12		
	- Tanda Jasa/Penghargaan/ Kehormatan		1		
	- Reformasi birokrasi		3		
	- Penyelenggaraan informasi, penyuluhan dan pembinaan aparatur		4		
	- Perumusan bahan telaahan dan rekomendasi pimpinan		5		
Penyelenggaraan Ketatausahaan				6.380	Unit Sekretariat
	Meningkatnya Kualitas Ketatausahaan dan Layanan Perkantoran				
	- Operasional Perkantoran dan Layanan Pimpinan		12		
	- Penyelenggaraan Organisasi dan Tatakelola		12		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2021	
	- Penyelenggaraan dan Layanan Persuadatan		12		
	- Penyelenggaraan dan Pelayanan Keasipan		12		
	- Penyelenggaraan Ketotuisahaan Menteri dan Eselon I		12		
	Penyelenggaraan Kehumasan dan advokasi hukum			18.861	Unit Sekretaris
	Terlaksananya Layanan Hukum				
	- Advokasi Hukum		1		
	Terlaksananya Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi				
	- Kehumasan		1		
	- Open government informasi program dan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM		1		
	Koordinasi Penyusunan Regulasi Koperasi dan UMKM			3.200	Unit Sekretaris
	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Regulasi Koperasi dan UMKM				
	- Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Regulasi Koperasi dan UMKM		3		
	- Meningkatkan kualitas pelayanan hukum		1		
	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Kelengkapan			3.850	Deputi Bidang Kelengkapan
	Terlaksananya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monev kelengkapan				
	- Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan		1		
	- Monev, data dan pengembangan aparatur		1		
	- Layanan Internal		1		
	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Pembinaan			4.482	Deputi Bidang Pembinaan
	Kualitas, ketepatan dan kelengkapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan urusan pembinaan				
	- Pelaksanaan Perencanaan, Program dan Anggaran, pelaporan dan kegiatan urusan umum serta sistem informasi pembinaan		3		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2021	
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Produksi dan Pemasaran	Pelaksanaan Meningkatkan kualitas, ketepatan dan kelengkapan pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta kerjasama teknik - Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monev urusan produksi dan pemasaran - Monev, data dan pengembangan aparatur - Pengelolan Layanan umum dan keuangan		1	4.050	Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
			1		
			1	3.950	Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
			2		
			3		
			2		
			1		
			1		
			1		
			1	4.000	Unit Sekretariat
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Pengembangan SDM	Pelaksanaan - Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Pengembangan SDM Layanan Internal Deputi Bidang Pengawasan - Layanan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan - Layanan Keuangan dan Tatausaha - Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi - Partisipasi Dalam Forum APEC dan Kerjasama dengan Korea		1	4.300	Deputi Bidang Pengawasan
			2		
			2		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
Mengembangkan Sistem Informasi dan Data					
Meningkatkan kelenjangan dan kualitas sistem					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2021	
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Kementerian Koperasi dan UKM	- Database Koperasi dan UMKM		1		1. Deputi Bidang Kelembagaan 2. Deputi Bidang Pembinaan 3. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 4. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha 5. Deputi Bidang Pengembangan SDM 6. LLP-KUKM 7. Unit Sekretariat
	- Sistem Jaringan Informatika		1		
	- Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM		90	70.280	
Sarana Prasarana LLP-KUKM	Terperluhinya Sarana dan Prasarana di Kementerian Koperasi dan UKM		1		LLP-KUKM
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Koperasi dan UKM			25.200	
	Terperluharnya Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan			2.500	
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran				9. Deputi Bidang Kelembagaan 10. Deputi Bidang Pembinaan 11. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
	- Layanan Perkantoran		12	546.976	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2021	2021	
	Terwujudnya Daya Saing dan Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Perekonomian		5,5			
	- <i>Persentase Jumlah Tenaga Kerja UMKM Sekunder/Provinsi, Primer Kab./Kota yang memiliki kategori sehat/berkualitas</i>		33			
	- <i>Jumlah wirasaha nasional</i>		10.000			
	Terwujudnya Daya Saing dan Kontribusi UMMKM dan Koperasi dalam Perekonomian.					
	- <i>Persentase Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam Pembentukan PDB (rata-rata/tahun)</i>		7,5			
	- <i>Persentase Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam ekspor non-migas (rata-rata/tahun)</i>		7			
	- <i>Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi dalam investasi (rata-rata/tahun)</i>		10,5			
	- <i>Pertumbuhan Produktivitas UMKM (rata-rata/tahun)</i>		5			
	- <i>Proporsi UMKM yang mengkses pembiayaan formal</i>		25			
	- <i>Jumlah UMKM dan Koperasi yang menerapkan standar/dikasi mutu dan sertifikasi produk</i>		2.000			
	- <i>Persentase anggota koperasi dalam permodalan</i>		55			
	- <i>Pertumbuhan jumlah anggota koperasi</i>		10			
	- <i>Pertumbuhan volume usaha koperasi</i>		18			
Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	Terlaksananya Dukungan Pemberdayaan KUMKM di				128.267	Unit Sekretariat

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2021	
	Daerah				
	- Pertugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL)		1035		
	- Operasional PLUT di Daerah		66		
	- Fasilitas Partneran dan Promosi KUMKM di Daerah		34		
	- Perencanaan program Kementerian Koperasi dan UKM		12		
	- Monitoring dan evaluasi kegiatan strategis		10		
	- Pengembangan data KUMKM		10		
	- Satuan tugas pengawasan koperasi		1212		
	- Monitoring dan Insentif Pendamping Unit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Daerah		188.000		
Penguatan Koperasi dan UMKM Yang Menghasilkan Produk Ramah Lingkungan				3.000	Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
	Meningkatnya pengembangan usaha produktif oleh koperasi melalui pemanfaatan energi terbarukan		30		
	- Jumlah koperasi yang didampangi dalam pengembangan eco tourism				
Perluasan Pembiayaan dan Jasa Keuangan Non Bank dan Advokasi Perbaikan Bagi Koperasi dan UMKM				1.831	Deputi Bidang Pembiayaan
	Kapasitas dan Jangkauan Layanan Keuangan Non Bank Bagi KUMKM		6		
	- Penurunan dan Penguatan Badan Layanan Umum Daerah		750		
	- Advokasi Perbaikan		300		
	- Desain skema pembiayaan KUMKM		50		
	- Pengembangan skema resi gudang melalui pembiayaan LPDB KUMKM				
Facilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil				31.000	Deputi Bidang Pembiayaan
	Akses KUMKM Pada Permodalan				
	- Wirusaha Pemula Yang Didukung Modal Awal Usaha (Start Up Capital)		3135		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah) 2021	Unit Organisasi Pelaksana
			2021		
	- Koperasi yang diperkuat untuk pengembangan usaha melalui Kemitraan		5		
	- Evaluasi dampak Pemberian Modal Awal Usaha		3135		
	- Skema UMKM bisnis start up melalui LPDB UMKM diperkuat dengan dana cadangan melalui bantuan pemerintah		50		
Penerapan Peraturan Perundangan di Bidang Koperasi dan UMKM					
	Meningkatnya penerapan peraturan perundang-undangan				
	- Analisis / evaluasi peraturan perundangan		25		
	- Sosialisasi peraturan perundangan bagi koperasi dan UMKM		34		
	- Dokumentasi peraturan perundang-undangan		10		
Perluasan dan Peningkatan Akses Pemasaran					
	Meningkatnya Promosi Dan Pemasaran Dalam Negeri				
	- Promosi dan pemasaran dalam negeri		500		
	Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Luar Negeri				
	- Jumlah KUKM yang mengikuti pameran luar negeri		50		
	Meningkatnya Fasilitas penerapan e-commerce				
	- Jumlah KUKM yang difasilitasi penerapan e-commerce		500		
Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Investasi					
	Meningkatnya profesionalisme dan keberlanjutan usaha UMKM dan koperasi				
	- Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang difasilitasi kemitraan dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)		500		
	- KUMK yang diperkuat dalam kemitraan rantai		500		
				6.400	Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2021	
	<ul style="list-style-type: none"> Nilai/pasok Pemantauan dan Evaluasi Kinerja KUKM dengan UMB 		500		
Pengembangan Kewirausahaan					
	Berkembangnya wirausaha baru yang berpotensi tumbuh naik kelas		1.500	46.049	Deputi Bidang Pengembangan SDM
	<ul style="list-style-type: none"> Peserta pemasyarakatan kewirausahaan 				
	Meningkatnya ratio jumlah wirausaha dan mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar				
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Peserta pelatihan kewirausahaan 		5.300	48.783	Deputi Bidang Pengembangan SDM
Peningkatan Kualitas SDM Koperasi					
	Meningkatnya kualitas SDM koperasi dan UKM dalam mendukung usaha koperasi dan UKM yang berkelanjutan				
	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Perkooperasian bagi Pengurus dan Manajer Koperasi 		5.000		
	<ul style="list-style-type: none"> Peserta pelatihan vocational 		5.500		
	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Perkooperasian Syariah bagi Pengurus dan Manajer Koperasi 		2.500		
Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi SDM KUKM					
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan diMak UMKM dalam mendukung perbaikan kualitas SDM UMKM			22.766	Deputi Bidang Pengembangan SDM
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah SDM koperasi dan UKM yang difasilitasi melalui SKKM 		3.000		
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Peserta pelatihan pengelola UKM berbasis kompetensi 		10.200		
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Peserta pelatihan manajemen berbasis kompetensi 		7.200		
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah SKKM yang dikembangkan 		1		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2021	
Peningkatan Standarisasi Mutu dan Sertifikasi Produk	Meningkatnya kualitas dan daya saing produk UMKM dan koperasi		1000	7.454	Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
	- UMKM yang difasilitasi Standarisasi Mutu dan Sertifikasi Produk untuk meningkatkan nilai tambah dan mendukung Pariwisata		1000		
	- UMKM yang difasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk potensial ekspor				
	Meningkatnya KUMKM yang difasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk untuk ekspor				
	- Jumlah KUMKM yang difasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk untuk ekspor		1.500		
Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan usaha terpadu KUMKM dalam rangka mendukung promosi d/ra produk, pusat promosi dan pameran, serta pendampingan bagi koperasi dan UMKM		70	21.350	Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
	- Sarana prasarana layanan usaha terpadu		70		
	- Fasilitas dan Manpower layanan usaha terpadu		73		
	- Penguatan Kelembagaan dan Pendampingan PLUF				
Pengelolaan Dana Bergulir	Meningkatnya volume dan kualitas penyaluran dana bergulir bagi KUMKM		12.000	163.606	LPDB-KUMKM
	- Analisa Penyaluran Dana Bergulir				
	Meningkatnya dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana				
	- Jumlah dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana		69		
Layanan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM	Meningkatnya peran LLP sebagai trading house KUMKM dalam rangka mendukung pemasaran dan			35.472	LLP-KUMKM

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator (Quick Wins)	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2021	
	- Trading House Koperasi dan UMKM		2.500		
	- Fasilitas promosi dan pemasaran produk UMKM dan Dukungan Manajemen Layanan Perkantoran		12		
	- Dukungan Manajemen dan Layanan Perkantoran		12		
	Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Perkantoran		1		
	- Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Perkantoran				
Pengembangan Investasi Usaha				1.500	Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
	Meningkatnya profesionalisme dan keberlanjutan usaha UMKM dan koperasi				
	- Koperasi dan UMKM yang difasilitasi kerjasama investasi		400		
	- Fasilitas Pencadangan Usaha bagi UMKM		200		
	- Koperasi yang difasilitasi sistem resi gudang		4		
Pemetaan Kondisi dan Peluang Usaha UMKM				1.500	Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
	Meningkatnya kualitas skema dan jangkauan usaha koperasi dan UMKM secara berkelanjutan				
	- Penerapan dan pemetaan early warning system untuk restrukturisasi usaha koperasi dan UMKM		500		
	- Penerapan standar/disasi restrukturisasi usaha koperasi dan UMKM		300		
	- Penerapan skema restrukturisasi usaha koperasi dan UMKM		150		
Penguatan Koperasi dan UMKM di Bidang Keuangan Syariah				1.250	Deputi Bidang Pembinaan
	Kapasitas dan Jangkauan Layanan Pembiayaan / Keuangan Syariah				
	- Regulasi kebijakan usaha sampai pinjam dan		3		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2021		
	perbiayaan oleh koperasi dengan prinsip syariah		3			
	- Kerja Sama Usaha Antar Lembaga Perbiayaan / Keuangan Syariah		300			
	- KSPPS/USPPS Koperasi yang terfasilitasi literasi dan penumbuhannya		150			
	- Penguatan manajemen koperasi melalui Dewan Pengawas Syariah Koperasi yang memperoleh bantuan sertifikat DSN MUI		300			
	- Pendayagunaan Sumber - Sumber Pembinaan Syariah		300			
	- Wirausaha baru yang didamping/dari dana Ziswaf KSPS/USPPS Koperasi		300			
Perlindungan Usaha KUMKM					3.500	Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
	Memingkatkan pengembangan usaha koperasi dan UMKM yang berkelanjutan		100			
	- Koperasi dan UMKM yang difasilitasi advokasi manajemen dan keuangan		100			
	- Koperasi dan UMKM yang dilampangi dalam penanganan dampak globalisasi		300			
	- Koperasi dan UMKM yang difasilitasi penengangan dampak bencana		50.500			
	- Registrasi pengusaha skala mikro dan kecil					
Penelitian dan Pengkajian Kebijakan di Bidang Koperasi dan UMKM					3.697	Deputi Bidang Pengembangan SDM
	Memingkatkan jumlah dan kualitas rekomendasi dari hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan kebijakan, program dan kegiatan di bidang UMKM dan koperasi		4			
	- Penelitian dan pengkajian koperasi		4			
	- Penelitian dan pengkajian UMKM		4			
	- Penelitian dan pengkajian Sumber Daya		4			
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi					26.925	5. Deputi Bidang Kelembagaan

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2021	2021	
	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi					5. Deputi Bidang Pembudayaan 7. Deputi Bidang Pengawasan 8. Deloplin
	- Persepsi Koperasi (Induk/Nasional, sekunder/provins, primer kab/kota yang memiliki kategori sehat/berkualitas)					
	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi.					
	- Partisipasi Anggota Koperasi dalam Permodalan					
Penguatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi						
	Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Usaha Simpan Pinjam Koperasi				1.250	Deputi Bidang Pembudayaan
	- Regulasi kebijakan usaha simpan pinjam oleh Koperasi		3			
	- Pengembangan Kerjasama Antar Usaha Simpan Pinjam Koperasi		3			
	- KSP/USP Koperasi yang diperkuat kelembagaan dan usahanya		300			
	- Penguatan manajemen koperasi melalui Pengelola KSP/KSPS yang memperoleh bantuan sertifikasi SKKN		500			
	- Advokasi Lirerasi dan Penumbuhan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi		500			
	- Advokasi kerja sama antar usaha simpan pinjam koperasi					
	- KSP/USP Koperasi yang terdokikasi kelembagaan dan usahanya					
Penataan Organisasi dan Badan Hukum Koperasi						
	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi				1.500	Deputi Bidang Kelembagaan

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2021		
	melalui pematangan organisasi dan badan hukum koperasi		1			
	- Pematangan badan hukum, anggaran dasar koperasi, dan jilid usaha koperasi		100			
	- Penggabungan, Peleburan dan Pembubaran Koperasi		100			
	- Sosialisasi dan Fasilitasi Akta Pendirian Koperasi yang anggotanya dari pengusaha mikro		1			
	- Tindak Lanjut Penggabungan, Peleburan dan Pembubaran Koperasi				1.150	Deputi Bidang Kelembagaan
Peningkatan Keanggotaan Koperasi						
	Peningkatan keanggotaan koperasi					
	- Kadrisasi Perkooperasian di Kalangan Pemuda (Lab Perkooperasian)		5			
	- Advokasi partisipasi anggota dalam permadalan dan usaha koperasi		100			
	- Advokasi partisipasi pengurus/wasan oleh anggota		100			
Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi						
	Jumlah pemeriksaan kelembagaan koperasi				1.640	Deputi Bidang Pengawasan
	- Pemeriksaan Organisasi, Kinerja dan Laporan Keuangan		20			
Peningkatan Tata Laksana Koperasi dan UMKM						
	Terlaksananya peningkatan tata laksana koperasi dan UMKM				1.350	Deputi Bidang Kelembagaan
	- Peningkatan manajemen koperasi perkotaan dan perdesaan		350			
	- Penerapan Tata Kelola UMK yang baik		300			
	- Penerapan advokasi akuntabilitas koperasi		300			
Penguatan Kontribusi Gerakan Koperasi						
	Memingkatkan kualitas keanggotaan koperasi dan tata kelola KUMKM				14.500	Dekopin

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2021	2021	
	- Revitalisasi Koperasi Perdesaan		600			
	- Promosi dan Advokasi Anggota Koperasi		3.000			
	- Jaringan Usaha Koperasi		400			
	- Dukungan Kegiatan DEKOPIN, DEKOPINWIL, DEKOPINDA		500			
	Penerapan Kepatuhan Koperasi				1.440	Deputi Bidang Pengawasan
	Meningkatnya kepatuhan koperasi					
	- Penerapan Sistem dan Kriteria Kepatuhan Koperasi		20			
	Penilaian Kualitas dan Kesehatan Kelengkapan dan Usaha Koperasi				1.440	Deputi Bidang Pengawasan
	Jumlah Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi					
	- Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi		30			
	Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam				1.440	Deputi Bidang Pengawasan
	Jumlah Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi					
	- Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Konvensional		20			
	Penanganan Rekomendasi Pasca Pemeriksaan Koperasi dan Usaha Simpan Pinjam				1.215	Deputi Bidang Pengawasan
	Pemantauan dan Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Koperasi					
	- Penanganan dan Pemantauan Hasil Pemeriksaan Koperasi		25			
	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro				81.781	6. Deputi Bidang Kelembagaan 7. Deputi Bidang Pembiayaan 8. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2021	
	Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang Berbasis Usaha Mikro				9. Deputi Bidang Pengembangan SDM 10. Unit Sekretariat
	- Persentase jumlah tenaga kerja UMKM (rata-rata/tahun)		5,5		
	- Persentase Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/Provinsi, Primer Kab./Kota yang memiliki kategori sehat/berkualitas)		33		
	- Persentase jumlah wirasusaha nasional		10.000		
	Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang Berbasis Usaha Mikro				
	- Persentase kontribusi Koperasi dan UMKM dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun)		7,5		
	- Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi dalam ekspor non-migas (rata-rata/tahun)		7		
	- Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi dalam investasi (rata-rata/tahun)		10,5		
	- Pertumbuhan Produktivitas UMKM (rata-rata/tahun)		5		
	- Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal		25		
	- Jumlah UMKM dan Koperasi yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk		2.000		
	- Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan		55		
	- Pertumbuhan jumlah anggota koperasi		10		
	- Pertumbuhan volume usaha koperasi		18		
Penguatan Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor Pertanian dan Perkebunan	Meningkatnya pengembangan, produktivitas dan keberlanjutan perusahaan produk unggulan daerah berbasis koperasi/sentra usaha mikro di Sektor Pertanian dan Perkebunan			2.572	Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2021	
	- Koperasi/Sentra Usaha Mikro bidang Pertanian dan perkebunan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui pembinaan		50		
Penguatan Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor Perikanan dan Peternakan	Meningkatnya pengembangan, produktivitas dan keberlanjutan perusahaan produk unggulan daerah berbasis koperasi/sentra usaha mikro di sektor Perikanan dan Peternakan - Jumlah Koperasi/UKM yang diperkuat kapasitas usaha melalui pembinaan		92	4.000	Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
	Meningkatnya Koperasi/UKM sektor peternakan dan pengolahan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui pembinaan - Jumlah Koperasi/UKM sektor peternakan dan pengolahan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui pembinaan		36		
Pengembangan SDM Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi	Meningkatnya kualitas SDM usaha mikro dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan - SDM UKM yang mendapat fasilitasi mogang - Fasilitasi ide usaha melalui kompetisi dan Inkubasi		2.500 30	4.714 8.959	Deputi Bidang Pengembangan SDM 3. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 4. Deputi Bidang Pembudayaan
Peningkatan Akses KUMIKM pada Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal	Meningkatnya Akses KUMIKM pada Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal - Perumbuhan dan penguatan lembaga Penjaminan Kredit Daerah - Usaha Mikro Sektor Prioritas Yang Didampingi		6 15.000		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2021	2021	
	Mengakses dan Mengelola Pembayaran/Kredit KUR		15.245			
	- Usaha Mikro Yang Mendapat Pendampingan Sertifikasi Tanah		50			
	- Koperasi yang dapat mengakses fasilitas Asuransi		100			
	- Koperasi dan Usaha Menengah Yang Mendapatkan Akses Pendanaan Melalui Pasar Modal					
	Penguatan Sistem Bisnis Koperasi Senta Usaha Mikro di Sektor Industri dan Jasa				4.218	Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
	Meningkatnya pengembangan, produktivitas dan keberlanjutan perusahaan produk unggulan daerah berbasis koperasi/sentra usaha mikro di sektor Industri dan Jasa		30			
	- Koperasi/Sentra Usaha Mikro bidang Industri dan Jasa yang diperkuat kapasitas usahanya melalui Kemitraan		20			
	- Koperasi/Sentra Usaha Mikro Industri dan Jasa yang diperkuat sistem bisnis					
	Meningkatnya Koperasi/UKM sektor industri kreatif dan pengolahan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan					
	- Meningkatkan Koperasi/UKM sektor industri kreatif dan pengolahan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan		20			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro				57.685	Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
	Meningkatnya akses pemasaran usaha informal dan fungsi pasar rakyat yang dirivitalisasi					
	- Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana		54			
	- Pedagog skala mikro informal / pedagang kaki lima yang difasilitasi perataan lokasi dan promosi		34			

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2021		
	- Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola Koperasi		100			
	Meningkatnya akses pemasaran usaha informal dan turgsi pasar rakyat yang direvitalisasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Pasca Bencana					
	Meningkatnya pedagang Skala Mikro Informal/Pedagang Kaki Lima yang Difasilitasi Penataan Lokasi, Sarana Usaha dan Promosi di Daerah					
	Penyuluhan dan Pendampingan Perkeperasian			3.850		Deputi Bidang Kewirausahaan
	Meningkatnya penyuluhan dan pendampingan perkeperasian					
	- Jumlah Pengembangan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Melalui Pendampingan Koperasi		1.235			
	- Jumlah Pembinaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan		150			
	- Jumlah Penyuluhan Perkeperasian Kepada Kelompok Masyarakat Strategis		500			
	- Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pembinaan Terintegrasi		400			

Tabel 4.9 Kerangka Penilaian Tahun 2022-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024		
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	Terwujudnya Koperasi yang Modern					1.185.231	1.308.025	1.309.225	1. Deputi Bidang Perkoperasian 2. Deputi Bidang Usaha Mikro 3. Unit Sekretariat	
			- Persentase Kontribusi PDB Sektor Koperasi	6	6	6				
			- Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern	1.000	1.000	1.000				
			- Pertumbuhan Start-up berbasis Koperasi	3.500	3.500	3.500				
			- Persentase Kontribusi PDB Sektor UMKM	65	65	65				
			- Persentase Total Nilai Ekspor UMKM	21,60	21,60	21,60				
			- Persentase Total Investasi UMKM	63	63	63				
			- Persentase UMKM Naik Kelas	4	4	4				
			- Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM	10	10	10				
			- Rasio Kelembagaan	3,95	3,95	3,95				
	Terwujudnya Kementrian Koperasi dan UKM yang profesional dan Berkinerja Tinggi							Unit Sekretariat		
	- Indeks Kualitas Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM		A	A	A					
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap		A	A	A					

Program/ Kegiatan	Outcome/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	Program/Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM		80	80	80				
	- Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM		A	A	A				
	- Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM		100	100	100				
	- Kualitas Integrasi Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM (%)		80	80	80				
	- Indeks Reformasi Birokrasi		4	4	4				
	- Tingkat Maturitas SPIP Kapabilitas APIP		A	A	A				
	- Nilai Akurabilitas Kinerja		WTP	WTP	WTP				
	- Opini BPK								
	Program Dukungan Manajemen					385.082	420.090	420.090	Unit Sekretariat
	Meningkatnya Efektivitas Manajemen dan Dukungan Sarana Prasarana Kementerian Koperasi dan UMKM		80	80	80				
	- Indeks kualitas kebijakan pengembangan Koperasi dan UMKM		A	A	A				
	- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengembangan Koperasi dan UMKM		Tinggi	Tinggi	Tinggi				
	- Rata-Rata Tingkat Kepuasan Daerah terhadap Kebijakan Urusan								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program Outcome/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	Koperasi dan UKM/UM								
	- Indeks profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM		90	90	90				
	- Persentase Jumlah Unit Kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM terlihat egresi dengan sistem data dan informasi		100	100	100				
	- Nilai reformasi birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM		80	80	80				
	- Tingkat Mutu/ulas SPIP dan Kapabilitas APIP Kementerian Koperasi dan UKM		Level 4	Level 4	Level 4				
	- Nilai SAKIP Kementerian Koperasi dan UKM		A	A	A				
	- Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM		WTP	WTP	WTP				
	- Jumlah Bulan Layanan Sarana Perkantoran		12 Bln	12 Bln	12 Bln				
	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Layanan Sarana Prasarana Bidang Perkooperasian					5.104	5.568	5.568	Deputi Bidang Perkooperasian
	Terbaikannya Koordinasi, Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Dukungan Sarana Prasarana Urusan Perkooperasian								
	- Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Layanan Sarana Prasarana Bidang Perkooperasian		1	1	1				
	- Layanan Perkantoran		1	1	1				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program Outcome/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Layanan Sarana Prasarana Bidang Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Dukungan Sarana Prasarana Urusan Usaha Mikro					5.281	5.761	5.761	Deputi Bidang Usaha Mikro
	- Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Layanan Sarana Prasarana Bidang Usaha Mikro		1	1	1				
	- Layanan Perkantoran		1	1	1				
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Layanan Sarana Prasarana Bidang Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Dukungan Sarana Prasarana Urusan Usaha Kecil dan Menengah					5.500	6.000	6.000	Deputi Bidang Usaha Mikro
	- Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Layanan Sarana Prasarana Bidang Usaha Kecil dan Menengah		1	1	1				
	- Layanan Perkantoran		1	1	1				
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Layanan Sarana Prasarana Bidang Kewirausahaan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Dukungan Sarana Prasarana Urusan Kewirausahaan					6.600	7.200	7.200	Deputi Bidang Usaha Mikro
	- Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan		1	1	1				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program Outcome/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	Layanan Sarana Prasarana Bidang Kewirausahaan		1	1	1				
	- Layanan Perkantoran								
Perencanaan program/Kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kementerian Koperasi dan UKM						5.808	6.336	6.336	Unit Sekretariat
	Kualitas Perencanaan program/kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kementerian Koperasi dan UKM								
	- Layanan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi		1	1	1				
Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan						147.772	161.205	161.205	Unit Sekretariat
	Kinerja Pengelolaan Keuangan								
	- Layanan Manajemen Keuangan		1	1	1				
Penyelenggaraan pemerkasan dan pengawasan pelaksanaan anggaran pusat dan daerah						8.250	9.000	9.000	Unit Sekretariat
	Akuntabilitas Kementerian Koperasi dan UKM								
	- Layanan Audit Internal		1	1	1				
Peningkatan kompetensi SDM aparatur, Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan ketatausahaan						16.974	18.517	18.517	Unit Sekretariat
	Kualitas dan kompetensi SDM aparatur, Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan ketatausahaan								
	- Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan Layanan Umum		1	1	1				
Layanan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kementerian Koperasi dan UKM						65.825	71.809	71.809	Unit Sekretariat
	Layanan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana untuk								

Program/ Kegiatan	Outcome/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	menjang kegiatan di Kementerian Koperasi dan UKM		12	12	12				
	- Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa KUKM, Layanan Sarana dan Prasarana Internal dan Perkantoran								
	Kehumasan, Pengembangan Data, Informasi Teknologi dan Penelitian Pengkajian					32.166	35.091	35.091	Unit Sekretariat
	Kualitas Informasi Publik, Kementerian Koperasi dan UKM								
	- Layanan Hukumi, Hubungan Masyarakat dan Informasi, Penelitian dan Pengembangan		1	1	1				
	Penyusunan Regulasi, kerjasama dalam dan luar negeri dan Penataan Organisasi Tata Kerja					19.800	21.600	21.600	Unit Sekretariat
	Kualitas Regulasi, kerjasama dalam dan luar negeri dan Organisasi Tata Kerja Kementerian Koperasi dan UKM								
	- Koordinasi Penyusunan dan Penataan Regulasi, Layanan Kerjasama dalam dan luar negeri, dan Penyelenggaraan tata laksana organisasi dan tata laksana		1	1	1				
	Layanan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana BLU					66.000	72.000	72.000	Unit Sekretariat
	Kualitas Layanan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana untuk menunjang kegiatan BLU								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome/Sasaran Kegiatan Output/Indikator)	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024		
Pengembangan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan	- Layanan Perkantoran		12	12	12				1. Deputi Bidang Perkoperasian 2. Deputi Bidang Usaha Mikro 3. Deputi Bidang Usaha kecil dan Menengah 4. Deputi Bidang Kewirausahaan 5. LP-DB-KUMKM 5. LP-KUKM	
	- Pertumbuhan start-up berbasis koperasi		900	850	850					
	- Persentase kontribusi PDB sektor koperasi		2	1	1					
	- Persentase Total Nilai Potensi Ekspor UMKM		17,28	19,44	21,60					
	- Persentase Jumlah UKM Milik Kelas		1,35	2,5	4					
	- Pertumbuhan Jumlah Tenaga UMKM		8	9	10					
	- Persentase Total Investasi UMKM		61	62	63					
	- Persentase Kontribusi PDB Sektor UMKM		63,73	64,76	65					
	Bidang Perkoperasian									
	Pengembangan kemitraan dan jaringan usaha koperasi					2.200	2.400	2.400		Deputi Bidang Perkoperasian
Perluasan akses dan skema pembiayaan koperasi	Jumlah Koperasi Yang Melakukan Kemitraan dan Jaringan Usaha								Deputi Bidang Perkoperasian	
	- Penguatan Kemitraan Koperasi		110	120	120	4.400	4.800	4.800		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome/Sasaran Kegiatan Output/Indikator)	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	Peningkatan Akses Pembayaran Perkooperasian		2	4	4				
	- Sistem Peningkatan Akses Pembayaran Perkooperasian								
Penerapan tata kelola dan manajemen koperasi yang modern						1.628	1.776	1.776	Deputi Bidang Perkooperasian
	Jumlah Koperasi Modern								
	- Inovasi Usaha Koperasi		200	75	150				
Kesehatan kelembagaan dan akuntabilitas koperasi						11.880	12.960	12.960	Deputi Bidang Perkooperasian
	Koperasi Yang Sehat Kelembagaannya dan Meningkat Akuntabilitasnya								
	- Pengembangan Tatakelola Manajemen dan Akuntabilitas Koperasi		110.000	120.000	120.000				
Pendampingan, pengawasan, penyuluhan dan peningkatan kualitas SDM koperasi						27.500	30.000	30.000	Deputi Bidang Perkooperasian
	Jumlah Peserta Peningkatan kualitas SDM Perkooperasian								
	- Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi		5.500	6.000	6.000				
Penguatan Kelembagaan, Pemerintah dan Gerakan Koperasi						14.500	14.500	14.500	Deputi Bidang Perkooperasian
	Jumlah Koperasi yang Diperkuat melalui DEKOPIN,DEKOPINWIL, DEKOPINDA								
	- Dukungan kegiatan koperasi, DEKOPIN,DEKOPINWIL, DEKOPINDA		1.100	1.100	1.100				
Bidang Usaha Mikro									
Penguatan pengelolaan usaha mikro						27.500	30.000	30.000	Deputi Bidang Usaha Mikro
	Jumlah Usaha Mikro Yang								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome/Sasaran Kegiatan Output/Indikator)	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	Terpetakan Potensi dan Peluang Usaha								
	- Petar Potensi dan Peluang Usaha Mikro		55.000	60.000	60.000				
	Perkuatan fasilitasi pembiayaan usaha mikro dan pengembangan investasi dan perlindungan usaha					6.000	12.000	12.000	Deputi Bidang Usaha Mikro
	Jumlah Usaha Mikro								
	Terfasilitasi Pembiayaan								
	- Fasilitasi Perlindungan dan Kerjasama Pembiayaan Usaha Mikro		2	4	4				
	Peningkatan jaringan kemitraan dan akses pemasaran usaha mikro					11.000	12.000	13.200	Deputi Bidang Usaha Mikro
	Jumlah Usaha Mikro								
	Terfasilitasi Pembiayaan								
	- Fasilitasi Perlindungan dan Kerjasama Pembiayaan Usaha Mikro		220	242	266				
	Pendampingan dan peningkatan kualitas SDM usaha mikro					27.500	30.000	30.000	Deputi Bidang Usaha Mikro
	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas SDM Usaha Mikro								
	- Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas SDM Usaha Mikro		220	242	266				
	Penguatan produk usaha mikro					275.000	300.000	300.000	Deputi Bidang Usaha Mikro
	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas SDM Usaha Mikro								
	- Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas SDM Usaha Mikro		55.000	60.000	60.000				
	Bidang Usaha Kecil dan Menengah								
	Pemetaan peluang pasar ekspor (market intelijen) dan Pengembangan sentra UKM berbasis komoditi					55.000	60.000	60.000	Deputi Bidang Usaha Usaha Kecil dan Menengah

Program/ Kegiatan dan ungsulan	Sasaran Program (Outcome/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	Jumlah Produk UKM Yang Ditingkatkan Peluang Pasar dan Ekspor								
	- Fasilitas Promosi dan Pemasaran Ekspor Produk UKM		11	12	12				
	Peningkatan standarisasi mutu dan sertifikasi produk skala nasional dan internasional					33.000	36.000	36.000	Deputi Bidang Usaha Usaha Kecil dan Menengah
	Jumlah Produk UKM Yang Ditingkatkan Kapasitas dan Mutu Produknya								
	- Inovasi Mutu Produk UKM berbasis standarisasi		11	12	12				
	Peningkatan dan perluasan jaringan usaha ke mitraan dan akses pemasaran produk usaha kecil dan menengah					6.600	7.200	7.200	Deputi Bidang Usaha Usaha Kecil dan Menengah
	Sistem Perluasan Kemitraan dan Jaringan UKM								
	- Produksi dan Kemitraan untuk Perluasan Pemasaran UKM		2	4	4				
	fasilitasi pembiayaan usaha kecil dan menengah					5.500	6.000	6.000	Deputi Bidang Usaha Usaha Kecil dan Menengah
	Sistem Perluasan Akses Pembiayaan UKM								
	- Sistem dan Perluasan Pembiayaan Usaha UKM		2	4	4				
	Pendampingan, peningkatan kualitas SDM dan expert UKM					18.927	20.648	20.648	Deputi Bidang Usaha Usaha Kecil dan Menengah
	Jumlah Peserta Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil dan menengah								
	- Peningkatan Kompetensi SDM Usaha Kecil dan		2.640	2.904	3.194				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program Outcome/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Bidang Kewirausahaan	Merengah								
Pemasyarakatan dan Sosialisasi Kewirausahaan	Jumlah Peserta Penumbuhan Wirausaha					11.000	12.000	12.000	Deputi Bidang Kewirausahaan
	- Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha		2.640	2.904	3.194				
Pengembangan Kewirausahaan termasuk kewirausahaan sosial	Jumlah Daerah Yang Iklim Kewirausahaannya Kondusif		34	34	34				
	- Sinkronisasi Pengembangan Regulasi dan Kebijakan Kewirausahaan								
Pelatihan kewirausahaan, vocational dan standarisasi kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan dan Standarisasi Kompetensi					3.520	3.840	3.840	Deputi Bidang Kewirausahaan
	- Pelatihan dan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi SDM KUKM berbasis Kompetensi		5.500	6.000	6.000				
Fasilitasi magang wirausaha	Jumlah Peserta Pelatihan dan Standarisasi Kompetensi					2.985	3.257	3.257	Deputi Bidang Kewirausahaan
	- Pelatihan dan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi SDM KUKM berbasis Kompetensi		550	605	666				
Pengembangan Inkubator Wirausaha	Jumlah Peserta Inkubasi Wirausaha					15.940	17.280	17.280	Deputi Bidang Kewirausahaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome/Sasaran Kegiatan Output/Indikator)	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	- Inkubasi Calon Wirusaha untuk Perumbuhan Wirusaha Baru		11.000	12.000	12.000				
LPDB-KUKM									
	Penyaluran Dana Bergulir Koperasi					179.966	196.327	196.327	LPDB-KUKM
	Jumlah Penyaluran Dana Bergulir untuk Koperasi								
	- Penyaluran Pinjaman/Perbiayaan Dana Bergulir LPDB- KUKM		13.230	15.120	15.120				
LP-KUKM									
	Layanan Pemasaran KUKM					50.550	55.146	55.146	LP-KUKM
	Jumlah KUKM Mitra yang terlayani								
	- Promosi dan Pemasaran Koperasi dan UMKM		3.300	3.600	3.600				

**BAB V
PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor : .../Per/M.KUKM/.../2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Koperasi dan UKM juga merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Selain itu, dokumen ini juga dimaksudkan dalam rangka menjalankan Undang-Undang No, 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006.

Selanjutnya Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024 digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, serta akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemudian, apabila diwaktu mendatang diperlukan adanya perubahan maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TETEN MASDUKI